

2025



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## **BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA DIY**

Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Telepon : (0274) 562811 Pswt 1169

Surel : [birokesra@jogjaprov.go.id](mailto:birokesra@jogjaprov.go.id)

Laman : [kesra.jogjaprov.go.id](http://kesra.jogjaprov.go.id)



## Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022 – 2027 dan Dokumen Penyelarasan Kinerja. Proses penyusunan laporan ini memperhatikan prinsip responsif gender dan inklusi sosial serta membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 30 Maret 2026

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat,



Faishol Muslim, S.I.P., M.Si.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**INSPEKTORAT**

*Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta*

Alamat Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Kode Pos 55166 Telepon (0274) 562009  
Faksimile (0274) 512567 Pos-el inspektorat@jogjaprov.go.id Laman <https://inspektorat.jogjaprov.go.id>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat dan valid serta dapat diukur pencapaiannya sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih andal.

Berdasarkan reviu yang telah kami laksanakan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini serta atas catatan dalam proses reviu telah ditindaklanjuti oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY.

Yogyakarta, 11 Maret 2026

Inspektur DIY,



Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc.

## Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY Tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian tujuan “Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat” :
  - Diukur dengan indikator persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda. Meta indikator: Jumlah kebijakan yang mendukung program pemda di tahun bersangkutan terhadap total program pemda yang akan didukung di akhir periode. Penjelasan detail meta indikator: Terdapat 5 (lima) Program Pemda yang diukur dengan 11 (sebelas) indikator, meliputi:
    - I. Program Pemerataan Kesejahteraan yang terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Indikator Indeks Gini dan Indikator Persentase Desa Mandiri.
    - II. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator yakni Indikator Harapan lama sekolah, Indikator Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Literasi Memenuhi Kompetensi Minimum dan Indikator Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Numerasi Memenuhi Kompetensi Minimum.
    - III. Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari 3 (tiga) indikator yakni Indikator Angka Harapan Hidup, Indikator Prevalensi Stunting dan Indikator Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak.
    - IV. Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat yang terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Indikator Indeks Pemberdayaan Gender dan Indikator Total Fertility Rate.
    - V. Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda yang terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Indikator Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional dan internasional).

Target capaian ditetapkan secara bertahap dari tahun 2024 hingga 2027 sebagai hasil akumulasi dari jumlah indikator program perangkat daerah yang berhasil dicapai.

Pada tahun 2024 (baseline), target sebesar 40% dicapai melalui 3 dari 7 indikator program yang dilaksanakan oleh Biro Bina Mental Spiritual.

Selanjutnya, pada tahun 2025 target meningkat menjadi 60%, yaitu 7 dari 11 indikator program Biro Kesejahteraan Rakyat.

Pada tahun 2026, target capaian naik menjadi 80% dengan pencapaian 9 dari 11 indikator, dan akhirnya pada tahun 2027 ditargetkan mencapai 100% dengan keberhasilan seluruh 11 indikator program perangkat daerah.

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis, yakni : 1. Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama; dan 2. Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah.
  - Target capaian indikator tujuan tahun 2025 sebesar 60%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 63.64%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 106,07%.
  - Capaian indikator ini belum dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena adanya perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah, dari Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY. Perubahan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, yang juga berdampak pada penyesuaian ketugasan.
2. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama”:
- Diukur dengan indikator persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi

naskah bahan kebijakan. Meta Indikator: Komposit rumusan bahan kebijakan yang menjadi draf kebijakan serta fasilitasi keagamaan. Penjelasan detail meta indikator:

- 1) Bidang Bina Mental = 1 rumusan bahan kebijakan.
- 2) Pelayanan Dasar terdapat 7 rumusan bahan kebijakan = 3 subkegiatan x 2 dokumen (korsin dan money) + 1 dokumen kajian.
- 3) Pelayanan Non Dasar terdapat 5 rumusan bahan kebijakan = 2 subkegiatan x 2 dokumen (korsin dan money)+ 1 dokumen kajian.

Maka total adalah 13 rumusan bahan kebijakan (akan menyesuaikan jumlah keluaran tahun berjalan). Hitungan capaian fasilitasi keagamaan :

- Fasilitasi Agama  $4/4 \times 100\% = 100\%$  Target

Hitungan persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar yang menjadi naskah bahan kebijakan:

- Tahun 2025 =  $8 \text{ dokumen tahun } n / 13 \text{ dokumen} + 100\% / 2 = 80\%$
- Tahun 2026 =  $11 \text{ dokumen tahun } n / 13 \text{ dokumen} + 100\% / 2 = 90\%$
- Tahun 2027 =  $13 \text{ dokumen tahun } n / 13 \text{ dokumen} + 100\% / 2 = 100\%$

Perhitungan target capaian dilakukan secara tahunan dan bukan merupakan hasil akumulasi, melainkan berdasarkan pencapaian indikator pada tahun berjalan. Pada tahun 2025, capaian dihitung berdasarkan rasio 8 rumusan bahan kebijakan dari total 13 rumusan bahan kebijakan (menyesuaikan jumlah keluaran tahun berjalan) yang disyaratkan, ditambah dengan capaian fasilitasi keagamaan sebesar 100%, lalu dirata-rata, sehingga diperoleh nilai 80%.

Selanjutnya, pada tahun 2026, capaian meningkat menjadi 90%, dihitung dari 11 rumusan bahan kebijakan dari total 13 rumusan bahan kebijakan (menyesuaikan jumlah keluaran tahun berjalan) ditambah capaian fasilitasi agama yang tetap 100%, kemudian dirata-rata.

Pada tahun 2027, seluruh indikator berhasil dipenuhi dengan 13 rumusan bahan kebijakan dari 13 rumusan bahan kebijakan (menyesuaikan jumlah keluaran tahun berjalan) yang tersedia dan capaian fasilitasi agama tetap di angka 100%, sehingga menghasilkan nilai akhir sebesar 100%.

Dengan demikian, setiap nilai tahunan merepresentasikan evaluasi mandiri atas pelaksanaan di tahun tersebut dan tidak menjumlahkan hasil tahun-tahun sebelumnya.

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Kesejahteraan Rakyat dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 80%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 103,85%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 129,81%.
  - Capaian indikator ini belum dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena adanya perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah, dari Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY. Perubahan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, yang juga berdampak pada penyesuaian ketugasan.
3. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah”:
- Diukur dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah. Meta indikator: Hasil evaluasi reformasi birokrasi perangkat Daerah. Penjelasan meta indikator: Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan:
    1. Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah.
    2. Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah.
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 92,08%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 93,28% Dengan demikian capaian ini

melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 101.30%.

- Capaian indikator ini belum dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena adanya perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah, dari Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY. Perubahan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, yang juga berdampak pada penyesuaian ketugasan.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Dinamika kebijakan Pemerintah Pusat memerlukan penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan di daerah;
2. Semakin diperlukannya peningkatan sinergitas antara pemerintah dengan swasta, masyarakat maupun organisasi non pemerintah dalam menangani isu strategis terkait kesejahteraan rakyat;
3. Kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat mengharuskan setiap personil untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas kedinasan yang pemanfaatannya tidak hanya terbatas pada internal perangkat daerah tetapi juga antar dan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas, kecepatan, dan transparansi pelayanan publik di bidang kesejahteraan rakyat;
5. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang menuntut optimalisasi perencanaan program, efektivitas anggaran, serta penguatan skala prioritas kegiatan;
6. Perlunya penguatan tata kelola hibah dan bantuan sosial yang semakin akuntabel, transparan, serta berbasis data terintegrasi;
7. Dinamika sosial kemasyarakatan yang semakin kompleks, termasuk isu kerukunan umat beragama, kemiskinan, dan ketimpangan sosial yang memerlukan pendekatan kolaboratif dan preventif;

8. Kebutuhan penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja untuk memastikan program kesejahteraan rakyat memberikan dampak nyata dan terukur;
9. Tuntutan reformasi birokrasi yang berkelanjutan, termasuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta penguatan budaya kerja yang adaptif, responsif, dan berintegritas;
10. Perlunya integrasi dan pemanfaatan data kesejahteraan rakyat secara lintas sektor guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

# Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif	4
Daftar Isi	10
Daftar Tabel	11
Daftar Gambar	14
BAB I Pendahuluan	15
1.1. <i>Cascading Kinerja</i> dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	15
1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	17
1.3. Isu-Isu Strategis	19
1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	22
1.5. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024	24
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	26
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	27
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	28
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	28
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	34
2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	37
BAB III Akuntabilitas Kinerja	38
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025	38
3.2. Capaian Kinerja Lainnya	85
3.3. Analisis Efisiensi Anggaran	95
3.4. Inovasi	96
3.5. Lintas Sektor	97
BAB IV Penutup	121
4.1. Kesimpulan	121
4.2. Langkah Perbaikan Kinerja	122
LAMP I R A N	123

## Daftar Tabel

Tabel I. 1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	22
Tabel I. 2	Sarana-Prasarana	23
Tabel I. 3	Anggaran Tahun 2024	23
Tabel I. 4	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil	24
Tabel II. 1	Tujuan dan Sasaran Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY, 2022-2027	28
Tabel II. 2	Strategi dan Arah Kebijakan	28
Tabel II. 3	Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024	28
Tabel II. 4	Perjanjian Kinerja Tujuan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY Tahun 2024	34
Tabel II. 5	Perjanjian Kinerja Sasaran Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY Tahun 2024	34
Tabel II. 6	Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY Tahun 2024	36

Tabel II. 7	Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Tahun 2024	36
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	38
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2024	38
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	49
Tabel III.4	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2024	52
Tabel III.5	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	58
Tabel III.6	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	64
Tabel III.7	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 1	66
Tabel III.8	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	74
Tabel III.9	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	80
Tabel III.10	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2	81

Tabel III.11.	Capaian Kinerja yang Mendukung Upaya Pengentasan Kemiskinan	85
Tabel III.12	Kontribusi Tujuan dan Sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah	91
Tabel III.13	Kontribusi Program Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah	94
Tabel III.14	Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran Belanja dan Efisiensi Anggaran Tahun 2024	95
Tabel III.15	Inventarisasi Lintas Sektor Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	99

# Daftar Gambar

Gambar I.1	<i>Cascading</i> Kinerja	16
Gambar I.2	Struktur Organisasi	17
Gambar I.3.	Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY	18
Gambar II.1.	Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	37
Gambar III.1	Beberapa Dokumen Kebijakan yang Dihasilkan Tahun 2024	61
Gambar III.2. – Gambar III 6	Festival Keagamaan	62
Gambar III.7 – Gambar III 12.	Festival Keagamaan	71

# BAB I Pendahuluan

## **Bab I berisi:**

1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

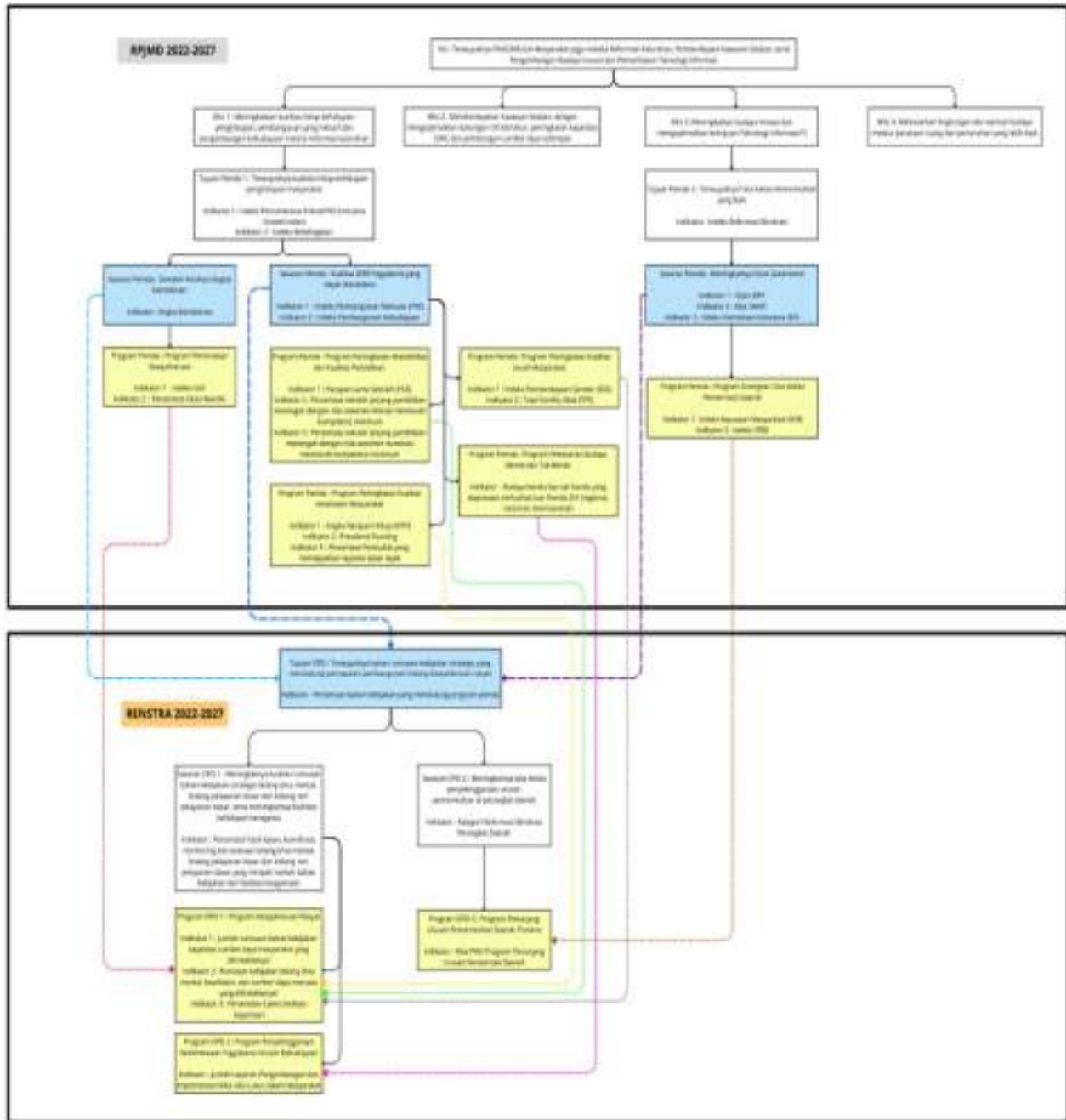
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

## **1.1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah***

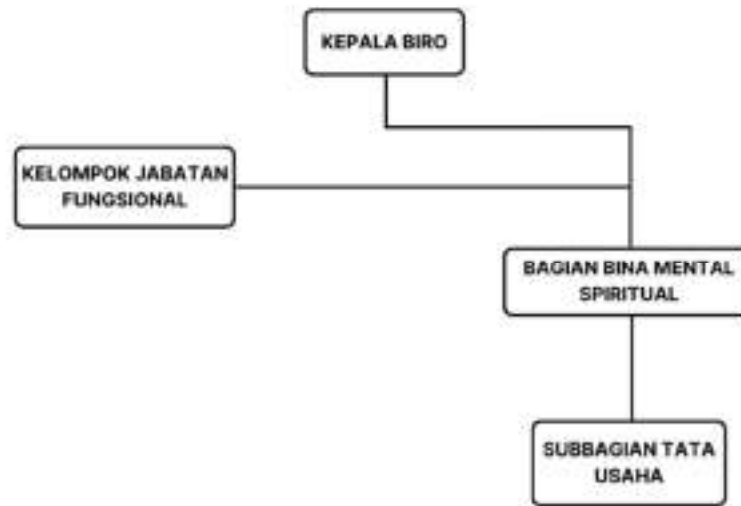
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja Penyelarasan



\* Penyesuaian dalam Penyelarasan Kinerja

**Gambar I.2 Struktur Organisasi**



*Sumber: Lampiran PERGUB DIY Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah*

### **1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan**

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD DIY 2022-2027, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

### Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY


Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut.

#### TUGAS

Melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis Urusan Kesejahteraan Rakyat.

#### FUNGSI

- penyusunan program kerja Biro;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kesehatan, sosial, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta perpustakaan dan kearsipan;
- pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kesehatan, sosial, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil, serta perpustakaan dan kearsipan;
- pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kesehatan, sosial, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta perpustakaan dan kearsipan;
- fasilitasi kehidupan beragama;
- penyusunan evaluasi capaian program Pemerintah Daerah;
- pembinaan reformasi birokrasi Biro;
- penyusunan kebijakan proses bisnis Biro;
- penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.



Jabatan Struktural/Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Biro</li> <li>2. Kepala Bagian Bina Mental Spiritual                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Subbagian Tata Usaha</li> </ol> </li> <li>3. Analis Kebijakan Ahli Madya</li> <li>4. Analis Kebijakan Ahli Muda</li> <li>5. Analis Kebijakan Ahli Pertama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelaah Teknis Kebijakan</li> <li>2. Di bawah Kepala Subbagian Tata Usaha:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelaah Teknis Kebijakan</li> <li>2. Pengolah Data dan Informasi</li> <li>3. Pengelola Layanan Operasional</li> <li>4. Penata Layanan Operasional</li> <li>5. Pengadministrasi perkantoran</li> </ol> </li> </ol>

### 1.3. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY adalah institusi sebagai penyiap bahan perumusan kebijakan di bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia. Isu strategis di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY antara lain sebagai berikut :

#### 1. Ketimpangan Antar Wilayah dalam Indikator Pendidikan

Masih terdapat ketimpangan antar kabupaten/kota di DIY dalam capaian Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kondisi ini menunjukkan belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah dan berbasis wilayah.

#### 2. Penguatan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter belum sepenuhnya diposisikan sebagai fondasi utama dalam sistem pendidikan. Penekanan yang masih dominan pada capaian akademik berpotensi mengurangi pembentukan nilai integritas, etika, dan budaya luhur yang menjadi ciri khas masyarakat DIY.

#### 3. Optimalisasi Sistem Zonasi Pendidikan

Implementasi sistem zonasi belum berjalan optimal akibat perbedaan kualitas sarana, prasarana, dan sumber daya pendidik antar wilayah. Hal ini berdampak pada persepsi ketidakmerataan mutu pendidikan dan memerlukan penguatan standarisasi serta pemerataan kualitas.

#### 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Tangguh dan Adaptif

Perkembangan teknologi dan transformasi digital menuntut sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, dan memiliki daya saing tinggi. Penguatan literasi digital dan kompetensi masa depan menjadi kebutuhan strategis dalam pembangunan kesejahteraan rakyat. Sementara itu permasalahan sosial seperti maraknya penyalahgunaan minuman keras dan Napza, sex bebas, judi online maupun pinjaman online semakin menurunkan kualitas sumber daya manusia.

#### 5. Tingkat Kemiskinan yang Masih Tinggi

Tingkat kemiskinan DIY yang masih berada di atas rata-rata nasional menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesejahteraan rakyat. Upaya pengentasan

kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan multidimensi dan kolaborasi lintas sektor.

6. Ketimpangan Pendapatan

Tingginya ketimpangan pendapatan menunjukkan adanya kesenjangan distribusi kesejahteraan di masyarakat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerentanan sosial apabila tidak diimbangi dengan kebijakan afirmatif dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif.

7. Integrasi Data Kesejahteraan Sosial

Belum optimalnya integrasi data kesejahteraan sosial berdampak pada ketepatan sasaran program dan bantuan. Diperlukan sistem data terpadu yang akurat dan mutakhir sebagai dasar pengambilan kebijakan yang efektif.

8. Kerentanan Sosial Kelompok Rentan

Kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin perkotaan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan sosial dasar. Penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan menjadi prioritas dalam memastikan keadilan sosial.

9. Tingginya Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Penyakit Menular

Angka penyakit tidak menular di DIY relatif tinggi, dipengaruhi oleh pola hidup dan faktor demografis. Upaya promotif dan preventif perlu diperkuat melalui edukasi kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.

10. Pencegahan dan Penurunan Stunting

Upaya percepatan penurunan stunting memerlukan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi, mulai dari intervensi gizi, sanitasi, hingga penguatan peran keluarga. Stunting menjadi isu strategis karena berdampak langsung pada kualitas generasi mendatang.

11. Pemerataan Pelayanan Kesehatan

Jaminan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat belum sepenuhnya merata, terutama bagi kelompok rentan. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

12. Penguatan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera perlu diperkuat dalam menghadapi dinamika sosial, perubahan struktur demografi, serta tantangan ketahanan keluarga. Keluarga merupakan pondasi utama dalam pembangunan kesejahteraan.

13. Peningkatan Fasilitas Pelayanan Jamaah Haji  
Fasilitas pelayanan bagi jamaah haji asal DIY memerlukan peningkatan kapasitas dan kualitas guna menjamin kenyamanan serta keselamatan jamaah, khususnya bagi jamaah lanjut usia.
14. Peningkatan Penghayatan Pengamalan Ajaran Agama  
Agama bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dihayati dan diamalkan. Agama yang dipahami, dirasakan, dan diamalkan secara konsisten akan menjadi sumber kekuatan spiritual dan sosial.
15. Penguatan Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama  
Dalam konteks masyarakat yang majemuk, penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama menjadi kebutuhan strategis guna menjaga stabilitas sosial dan harmoni kehidupan bermasyarakat.
16. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan  
Pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan belum sepenuhnya optimal. Diperlukan komitmen lintas sektor untuk memastikan kesetaraan akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki.
17. Perlindungan Perempuan dan Anak  
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi perhatian serius. Upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi perlu diperkuat melalui pendekatan terpadu berbasis keluarga dan masyarakat.
18. Penguatan Ketahanan Keluarga  
Perubahan sosial yang cepat berdampak pada dinamika keluarga. Penguatan peran keluarga sebagai pusat pendidikan karakter, perlindungan anak, dan pembangunan kesejahteraan menjadi prioritas strategis.
19. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan  
Pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya kelompok rentan dan kepala keluarga perempuan, perlu ditingkatkan guna mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
20. Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda  
Pelestarian budaya benda maupun tak benda menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Upaya perlindungan dan penguatan nilai-nilai budaya menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan ketahanan sosial masyarakat DIY.

#### 1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

No	Jabatan	Formasi						Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi					Laki	Perempuan
1	2	3	4					5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA	SMP		S2	S1	D3	SMA	SMP		
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1					1	1					1	
B	Jabatan Administrasi														
	1. Administrator	1		1				1		1					1
	2. Pengawas	1		1				1	1					1	
	3. Pelaksana	38	0	24	8	5	1	25	5	14	5	1	0	7	18
C	Jabatan Fungsional	24	9	10	5			8	6	12	0	0	0	4	4
	Jumlah	65						36	10	27	5	1		13	23

Sumber: Data Kepegawaian Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 27 orang (75%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 10 orang (27,78%), D3 5 orang (13,89%), SLTA 1 orang (2,78%). Berdasarkan data kepegawaian, dari total 36 pegawai, saat ini tidak terdapat pegawai penyandang disabilitas yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional. Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit, kesetaraan gender, dan inklusi sosial dalam manajemen SDM aparatur.

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY masih mengalami kekurangan pegawai sebanyak 29 orang, yang terdiri atas 16 pejabat pelaksana substantif dan 13 pejabat pelaksana administratif. Meskipun demikian, tidak terdapat pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan maupun yang tidak kompeten dalam melaksanakan tugas pada jabatan pelaksana substantif.

Kondisi kekurangan formasi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY, khususnya dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategis di bidang Kesejahteraan Rakyat

**Tabel I. 2 Sarana-Prasarana**

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	<b>Aset Tetap</b>	606 unit	2.188.465.000
1	Peralatan dan mesin	407 unit	2.058.209.680
2	Alat Angkutan	9 unit	950.427.070
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0 unit	0
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	307 unit	568.953.560
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	7 unit	37.900.000
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	12 unit	7.942.000
7	Komputer	72 unit	492.987.050
	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>1 unit</b>	<b>114.602.000</b>

Sumber: Data Neraca Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY 31 Desember 2025 (Unaudited)

\*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2025

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 3 (tiga) unit kendaraan operasional, dan 6 (enam) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

**Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2025**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
4 1 0 2	Retribusi Daerah	Rp0	Rp0	Rp0
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp8.657.539.300</b>	<b>Rp5.841.840.000</b>	<b>(Rp2.815.699.300)</b>

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5	1	0 1	Belanja Pegawai	Rp0.	Rp0	Rp0
5	1	0 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp7.957.539. 300	Rp5.141.84 0.000	(Rp2.815.699.300)
5	1	0 5	Belanja Hibah	Rp700.000.00 0	Rp700.000. 000	Rp0
<b>5</b>	<b>2</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
5	2	0 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp0	Rp0	Rp0
5	2	0 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0	Rp0	Rp0
5	2	0 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp0	Rp0	Rp0
Jumlah Belanja				<b>Rp8.657.539. 300</b>	<b>Rp5.841.8 40.000</b>	<b>(Rp2.815.699.300)</b>
Total Surplus/(Defisit)				<b>(Rp8.657.539 .300)</b>	<b>(Rp5.841. 840.000)</b>	
<b>6</b>			<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				Rp0	Rp0	Rp0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				Rp0	Rp0	Rp0
Pembiayaan Neto				Rp0	Rp0	Rp0

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY semula Rp8.657.539.300 dan mengalami perubahan menjadi Rp5.841.840.000 atau berkurang Rp2.815.699.300 Perubahan anggaran Tahun 2025 merupakan cerminan dukungan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY dalam bentuk Refocusing dan realokasi anggaran.

### 1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tabel I. 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat	Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
	<p>daerah pada komponen Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga pada masa selanjutnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Pemerintah Daerah.</p>	<p>manajemen kinerja yang meliputi Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melibatkan peran lintas sektor secara intensif melalui rapat koordinasi.</p>
2.	<p>Mempertahankan serta meningkatkan praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dalam rangka menunjang pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah DIY.</p>	<p>Biro Kesejahteraan Rakyat terus mengupayakan praktik baik budaya kinerja melalui kegiatan apel rutin setiap Senin pagi dan peningkatan kapasitas pegawai setiap triwulan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan solidaritas antar pegawai dengan harapan meningkatnya semangat kerja yang mendorong pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah DIY.</p>

## BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

### **Bab II berisi:**

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Tahun 2025 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan baik melalui mekanisme Penyelarasan Kinerja maupun perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyelarasan Kinerja di Pemerintah Daerah DIY dilaksanakan sebagai upaya integrasi dengan arah kebijakan pembangunan nasional, sekaligus melakukan reviu capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah melampaui target guna mendorong penetapan target yang lebih menantang dan berdampak pada periode berikutnya. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan Dokumen Penyelarasan Kinerja.

Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027.

## 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai cascade kinerja, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah “Semakin kecilnya tingkat kemiskinan”. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY selama lima tahun adalah:

### “Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat”

Adapun tujuan dan sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY dalam waktu lima tahun yang telah diselaraskan dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran Stratis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY**

N O.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	Kondisi Awal (Baseline 2022)	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Periode */Renstra
					2023	2024	2025*	2026*	2027*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda	%	n/a	n/a	40	60*	80*	100*	100*
1.	Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitas kehidupan beragama.	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, dan bidang non pelayanan dasar, yang menjadi naskah bahan kebijakan dan fasilitas keagamaan.	%	n/a	n/a	67,5	80*	90*	100*	100*
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi OPD	Indeks	n/a	n/a	A (88,18)	A (92,08)*	A (92,09)*	A (92,10)*	A (92,10)*

\* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

## 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat.	1.Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar serta meningkatnya fasilitas kehidupan beragama.	Meningkatkan efektifitas koordinasi penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sehingga menghasilkan bahan rumusan kebijakan yang berkualitas.	Meningkatkan persentase kualitas hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar yang menjadi naskah bahan kebijakan dan fasilitas kegamaan. Meningkatkan kualitas pembangunan inklusif yang menyeluruh dan melibatkan kaum rentan (difabel, perempuan, dan anak) tanpa memandang latar belakang, kemampuan, status dan karakteristik.
	2.Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah.	Meningkatkan koordinasi dengan semua stakeholders terkait bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar serta meningkatnya fasilitas kehidupan beragama.	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi Perangkat Daerah. Meningkatkan kualitas pembangunan inklusif yang menyeluruh dan melibatkan kaum rentan (difabel, perempuan, dan anak) tanpa memandang latar belakang, kemampuan, status dan karakteristik.

## 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY tahun 2025 dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel II. 3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang	1. Meningkatkan kualitas perumusan bahan kebijakan	<b>1.1. Program Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>4.145.272.750</b>	<b>4.208.534.500</b>	<b>63.261.750</b>
		<b>1.1.1. Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual</b>	<b>3.408.106.000</b>	<b>3.387.567.000</b>	<b>(20.539.000)</b>

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatkan fasilitas kehidupan beragama	1.1.1.1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	225.000	225.000	0
		1.1.1.2. Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	3.407.881.000	3.387.342.000	(20.539.000)
		<b>1.1.2. Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>	<b>352.252.900</b>	<b>423.034.650</b>	<b>70.781.750</b>
		1.1.2.1 Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	161.931.500	161.769.450	(162.050)
		1.1.2.2. Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	190.321.400	261.265.200	70.943.800
		<b>1.1.3. Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>	<b>384.913.850</b>	<b>397.932.850</b>	<b>13.019.000</b>
		1.1.3.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga,	384.913.850	397.932.850	13.019.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
		Kebudayaan, dan Pariwisata			
		<b>1.2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan</b>	<b>4.100.749.000</b>	<b>1.294.041.000</b>	<b>(2.806.708.000)</b>
		1.2.1 Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	<b>4.100.749.000</b>	<b>1.294.041.000</b>	<b>(2.806.708.000)</b>
		1.2.1.1 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	4.100.749.000	1.294.041.000	(2.806.708.000)
		Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 1	8.246.021.750	5.502.575.500	(2.743.446.250)
	2. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	<b>2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>411.517.550</b>	<b>339.264.500</b>	<b>(72.253.050)</b>
		<b>2.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.666.600</b>	<b>7.666.600</b>	<b>(3.000.000)</b>
		2.1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.459.000	4.459.000	(3.000.000)
		2.1.1.2. Koordinasi dan	1.385.600	1.385.600	0

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
		Penyusunan DPA-SKPD			
		2.1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.822.000	1.822.000	0
		<b>2.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.778.000</b>	<b>11.738.000</b>	<b>(2.040.000)</b>
		2.1.2.1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.663.000	6.623.000	(2.040.000)
		2.1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.713.000	2.713.000	0
		2.1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.402.000	2.402.000	0
		<b>2.1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>12.425.000</b>	<b>10.865.000</b>	<b>(1.560.000)</b>
		2.1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.425.000	10.865.000	(1.560.000)
		<b>2.1.4. Administrasi Umum</b>	<b>200.553.950</b>	<b>134.900.900</b>	<b>(65.653.050)</b>

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
		<b>Perangkat Daerah</b>			
		2.1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.872.000	2.872.000	0
		2.1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.788.900	11.636.900	(1.152.000)
		2.1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.316.000	2.316.000	0
		2.1.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.090.000	15.090.000	0
		2.1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.764.000	1.764.000	0
		2.1.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.723.050	101.222.000	(64.501.050)
		<b>2.1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.900.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>0</b>
		2.1.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	0
		2.1.5.2. Penyediaan Jasa	3.900.000	3.900.000	0

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
		<b>2.1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>165.194.000</b>	<b>165.194.000</b>	<b>0</b>
		2.1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.592.000	34.592.000	0
		2.1.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.054.000	96.054.000	0
		2.1.6.3. Pemeliharaan Mebel	2.340.000	2.340.000	0
		2.1.6.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.448.000	19.448.000	0
		2.1.6.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.760.000	12.760.000	0

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
		Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 2	<b>411.517.550</b>	<b>339.264.500</b>	<b>(72.253.050)</b>
<b>Total Anggaran yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025</b>			<b>8.657.539.300</b>	<b>5.841.840.000</b>	<b>(2.815.699.300)</b>

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY Tahun 2025

#### 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

**Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Tujuan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY Tahun 2025**

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda	%	60	Triwulan I	60
					Triwulan II	60
					Triwulan III	60
					Triwulan IV	60*)

Keterangan:

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome

**Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Sasaran Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan	%	80	Triwulan I	80
					Triwulan II	80

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
	strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitas kehidupan beragama.	evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, dan bidang non pelayanan dasar, yang menjadi naskah bahan kebijakan dan fasilitas keagamaan.			Triwulan III	80
					Triwulan IV	80*)
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi OPD	indeks	A	Triwulan I	88,19 (A)
					Triwulan II	88,19 (A)
					Triwulan III	88,19 (A)
					Triwulan IV	88,19 (A) *)

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Kesejahteraan Rakyat (APBD)	Rp4.145.272.750
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (DAIS)	Rp4.100.749.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp411.517.550
	Jumlah Anggaran	Rp8.657.539.300

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

Pada tahun 2025, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya Penyelarasan Kinerja dan perubahan anggaran kegiatan dengan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah DIY Tahun 2025**

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan *	Triwulan	Target**
1.	Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda	%	60*	Triwulan I	60
					Triwulan II	60
					Triwulan III	60
					Triwulan IV	60**

Keterangan:

\* Target Tahunan berdasarkan Berita Acara Penyelarasan Kinerja

\*\* Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

**Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah DIY Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan *	Triwulan	Target**
1.	Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar, serta meningkatkan fasilitasi kehidupan beragama.	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, dan bidang non pelayanan dasar, yang menjadi naskah bahan kebijakan dan fasilitasi keagamaan.	%	80	Triwulan I	80
					Triwulan II	80
					Triwulan III	80
					Triwulan IV	80*)
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi OPD	indeks	A	Triwulan I	92,08 (A)
					Triwulan II	92,08 (A)
					Triwulan III	92,08 (A)
					Triwulan IV	92,08 (A) *)

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
4.	Program Kesejahteraan Rakyat (APBD)	Rp4.208.534.500

5.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (DAIS)	Rp1.294.041.000
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp339.264.500
	Jumlah Anggaran	Rp5.841.840.000

2. \*Target Tahunan berdasarkan Berita Acara Penyelarasan Kinerja
3. \*\* Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

## 2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi [sungguh.jogjaprov.go.id](http://sungguh.jogjaprov.go.id) yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

**Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP**



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

## BAB III Akuntabilitas Kinerja

### Bab III berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2025
2. Capaian Kinerja Lainnya
3. Efisiensi Anggaran
4. Inovasi
5. Lintas Sektor

### 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY dengan Bapak Gubernur DIY di tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

❖ **Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**

**Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TAR GET AKHIR PERIO DE*/ RPJMD/ REN STRA
						TARG ET*	REA LI SASI	PER SEN TAS E	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Tujuan: Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	Indikator: Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda  Meta Indikator: Jumlah kebijakan yang	%	n/a	42,85	60*	63,6 4 (ses uai data Biro Kese jahte raan Raky at Setd	106, 07 (106 ,07= 63,6 4/60 *10 0%)	Sa ngat baik.	100

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TAR GET AKHIR PERIO DE*/ RPJMD/ REN STRA
						TARG ET*	REA LI SASI	PER SEN TAS E	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<p>mendukung program pemda di tahun bersangkutan terhadap total program pemda yang akan didukung di akhir periode.</p> <p><u>Penjelasan detail dari Meta Indikator:</u></p> <p>Terdapat 5 (lima) Program Pemda yang diukur dengan 11 (sebelas) indikator, meliputi:</p> <p>I. Program Pemerataan Kesejahteraan yang terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Indikator Indeks Gini dan Indikator Persentase Desa Mandiri.</p> <p>II. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan yang terdiri</p>					a DIY)			

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TAR GET AKHIR PERIO DE*/ RPJMD/ REN STRA
						TARG ET*	REA LI SASI	PER SEN TAS E	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<p>dari 3 (tiga) Indikator yakni Indikator Harapan lama sekolah, Indikator Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Literasi Memenuhi Kompetensi Minimum dan Indikator Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Numerasi Memenuhi Kompetensi Minimum.</p> <p>III. Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari 3 (tiga) indikator yakni Indikator Angka Harapan Hidup, Indikator Prevalensi</p>								

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TAR GET AKHIR PERIO DE*/ RPJMD/ REN STRA
						TARG ET*	REA LI SASI	PER SEN TAS E	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<p>Stunting dan Indikator Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak.</p> <p>IV. Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat yang terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Indikator Indeks Pemberdayaan Gender dan Indikator Total Fertility Rate.</p> <p>V. Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda yang terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Indikator Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional dan</p>								

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TAR GET AKHIR PERIO DE*/ RPJMD/ REN STRA
						TARG ET*	REA LI SASI	PER SEN TAS E	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<p>internasional)</p> <p>Target capaian ditetapkan secara bertahap dari tahun 2024 hingga 2027 sebagai hasil akumulasi dari jumlah indikator program perangkat daerah yang berhasil dicapai.</p> <p>Pada tahun 2024 (baseline), target sebesar 40% dicapai melalui 3 dari 7 indikator program yang dilaksanakan oleh Biro Bina Mental Spiritual.</p> <p>Selanjutnya, pada tahun 2025 target meningkat menjadi 60%, yaitu 7 dari 11 indikator program Biro Kesejahteraan Rakyat.</p> <p>Pada tahun 2026, target capaian naik</p>								

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TAR GET AKHIR PERIO DE*/ RPJMD/ REN STRA
						TARG ET*	REA LI SASI	PER SEN TAS E	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		menjadi 80% dengan pencapaian 9 dari 11 indikator, dan akhirnya pada tahun 2027 ditargetkan mencapai 100% dengan keberhasilan seluruh 11 indikator program perangkat daerah.								
1	Sasaran 1: Meningkatkan kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama	<p><u>Indikator:</u> Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan</p> <p><u>Meta Indikator:</u> Komposit rumusan bahan kebijakan yang menjadi draf kebijakan serta fasilitasi keagamaan</p>	%	n/a (perbedaan indikator karena nama anggaran RP D)	160	80*	103,85 (sesuai data Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY)	129,81	Sangat Baik	100

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TAR GET AKHIR PERIO DE*/ RPJMD/ REN STRA
						TARG ET*	REA LI SASI	PER SEN TAS E	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<p><u>Penjelasan detail dari Meta Indikator:</u>            1) Bidang Bina Mental = 1 rumusan bahan kebijakan.            2) Pelayanan Dasar terdapat 7 rumusan bahan kebijakan = 3 subkegiatan x 2 dokumen (korsin dan monev) + 1 dokumen kajian.            3) Pelayanan Non Dasar terdapat 5 rumusan bahan kebijakan = 2 subkegiatan x 2 dokumen (korsin dan monev) + 1 dokumen kajian.            Maka total adalah 13 rumusan bahan kebijakan (akan menyesuaikan jumlah keluaran</p>								

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TAR GET AKHIR PERIO DE*/ RPJMD/ REN STRA
						TARG ET*	REA LI SASI	PER SEN TAS E	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<p>tahun berjalan).</p> <p>Hitungan capaian fasilitasi keagamaan :</p> <p style="padding-left: 40px;">Fasilitasi Agama  <math>4/4 \times 100\% = 100\%</math>            Target</p> <p>Hitungan persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar yang menjadi naskah bahan kebijakan:</p> <p style="padding-left: 40px;">Tahun 2025 = 8 dokumen tahun n /13 dokumen + <math>100\% / 2 = 80\%</math></p> <p style="padding-left: 40px;">Tahun 2026 = 11 dokumen tahun n/13 dokumen + <math>100\% / 2 = 90\%</math></p> <p style="padding-left: 40px;">Tahun 2027 = 13 dokumen tahun n//13 dokumen +</p>								

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TAR GET AKHIR PERIO DE*/ RPJMD/ REN STRA
						TARG ET*	REA LI SASI	PER SEN TAS E	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<p>100% / 2 = 100%</p> <p>Perhitungan target capaian dilakukan secara tahunan dan bukan merupakan hasil akumulasi, melainkan berdasarkan pencapaian indikator pada tahun berjalan. Pada tahun 2025, capaian dihitung berdasarkan rasio 8 rumusan bahan kebijakan dari total 13 rumusan bahan kebijakan (menyesuaikan jumlah keluaran tahun berjalan) yang disyaratkan, ditambah dengan capaian fasilitasi keagamaan sebesar 100%, lalu dirata-rata, sehingga diperoleh nilai 80%.</p>								

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TAR GET AKHIR PERIO DE*/ RPJMD/ REN STRA
						TARG ET*	REA LI SASI	PER SEN TAS E	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<p>Selanjutnya , pada tahun 2026, capaian meningkat menjadi 90%, dihitung dari 11 rumusan bahan kebijakan dari total 13 rumusan bahan kebijakan (menyesuaikan jumlah keluaran tahun berjalan) ditambah capaian fasilitasi agama yang tetap 100%, kemudian dirata-rata.</p> <p>Pada tahun 2027, seluruh indikator berhasil dipenuhi dengan 13 rumusan bahan kebijakan dari 13 rumusan bahan kebijakan (menyesuaikan jumlah keluaran tahun berjalan) yang tersedia dan capaian fasilitasi</p>								

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TAR GET AKHIR PERIO DE*/ RPJMD/ REN STRA
						TARG ET*	REA LI SASI	PER SEN TAS E	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<p>agama tetap di angka 100%, sehingga menghasilkan nilai akhir sebesar 100%.</p> <p>Dengan demikian, setiap nilai tahunan merepresentasikan evaluasi mandiri atas pelaksanaan di tahun tersebut dan tidak menjumlahkan hasil tahun-tahun sebelumnya.</p>								
2	Sasaran 2: Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	<p><u>Indikator:</u> Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</p> <p><u>Meta Indikator:</u> Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</p> <p><u>Penjelasan detail dari Meta Indikator:</u> Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi</p>	kategori	A	A (88,18)	(A) 92,08*	(A) 93,28 (sesuai data Pemda DIY melalui Biro Organisasi pada evaluasi RB setiap	101,30	Sangat Baik	(A) 92,10

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TAR GET AKHIR PERIO DE*/ RPJMD/ REN STRA
						TARG ET*	REA LI SASI	PER SEN TAS E	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan : 1. Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah. 2. Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah.					tahun)			

\* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyeragaman Kinerja

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

### 1.1.1. Tujuan Perangkat Daerah

Kinerja Tujuan Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

**Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

Tujuan	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan detail dari Meta Indikator
1	2	3	4
Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda	Jumlah kebijakan yang mendukung program pemda di tahun bersangkutan terhadap total program pemda yang akan didukung di akhir periode.	<p>Terdapat 5 (lima) Program Pemda yang diukur dengan 11 (sebelas) indikator, meliputi:</p> <p>I. Program Pemerataan Kesejahteraan yang terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Indikator Indeks Gini dan Indikator Persentase Desa Mandiri.</p> <p>II. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator yakni Indikator Harapan lama sekolah, Indikator Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Literasi Memenuhi Kompetensi Minimum dan Indikator Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Numerasi Memenuhi Kompetensi Minimum.</p> <p>III. Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari 3 (tiga) indikator yakni Indikator Angka Harapan Hidup, Indikator Prevalensi Stunting dan Indikator Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak.</p> <p>IV. Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat yang terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Indikator Indeks Pemberdayaan Gender dan Indikator Total Fertility Rate.</p> <p>V. Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda yang terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Indikator Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional dan internasional).</p> <p>Target capaian ditetapkan secara bertahap dari tahun 2024 hingga 2027 sebagai hasil akumulasi dari jumlah indikator program perangkat daerah</p>

Tujuan	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan detail dari Meta Indikator
1	2	3	4
			<p>yang berhasil dicapai.</p> <p>Pada tahun 2024 (baseline), target sebesar 40% dicapai melalui 3 dari 7 indikator program yang dilaksanakan oleh Biro Bina Mental Spiritual.</p> <p>Selanjutnya, pada tahun 2025 target meningkat menjadi 60%, yaitu 7 dari 11 indikator program Biro Kesejahteraan Rakyat.</p> <p>Pada tahun 2026, target capaian naik menjadi 80% dengan pencapaian 9 dari 11 indikator, dan akhirnya pada tahun 2027 ditargetkan mencapai 100% dengan keberhasilan seluruh 11 indikator program perangkat daerah.</p>

Realisasi capaian tujuan dihitung pada Triwulan IV Tahun 2025. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY mendukung 5 (lima) program Pemerintah Daerah yang diukur melalui 11 (sebelas) indikator program. Adapun pada Tahun 2024, telah terealisasi 3 (tiga) indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan prevalensi stunting, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

1. Hingga Triwulan IV 2025, Biro Kesejahteraan Rakyat telah melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD yang mendukung 4 indikator program pemda (poin a-d) terdiri dari :
  - a. Persentase Desa Mandiri
    - Peraturan Gubernur DIY Nomor 9/2025 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan tanggal 24 Februari 2025.
  - b. Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak
    - SK Gubernur DIY Nomor 116/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 282/KEP/2018 Tentang Pengurus Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya di Lingkungan Pemda DIY tanggal 21 Maret 2025.
    - SK Gub DIY Nomor 92/TIM/2025 tentang Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat DIY tanggal 3 Juli 2025.

- SK Gubernur DIY Nomor 99/TIM/2025 Tentang Pembentukan Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria DIY tanggal 21 Juli 2025.
- c. Indeks Pemberdayaan Gender.
- SE Gubernur DIY Nomor 3310/2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan dan Anak di DIY tanggal 8 Oktober 2025.
- d. Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (Regional, nasional, internasional) :
- Surat Rekomendasi Sekretaris Daerah DIY kepada Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan) DIY perihal Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan dan Pengembangan Seni Tradisi di DIY Nomor B/400.6.1/4248/BR.8 tanggal 22 Desember 2025.
- e. Indeks Gini
- Direncanakan didukung pada kegiatan di tahun 2026/2027.
- f. Total Fertility Rate
- Direncanakan didukung pada kegiatan di tahun 2026/2027.
- g. Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Literasi Memenuhi Kompetensi Minimum
- Direncanakan didukung pada kegiatan di tahun 2026.
- h. Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Numerasi Memenuhi Kompetensi Minimum
- Direncanakan didukung pada kegiatan di tahun 2026.
2. Hingga Triwulan IV 2025 terealisasi 7 indikator dari total 11 indikator terdiri dari 3 indikator program pemda tahun 2024 + 4 indikator program pemda Triwulan IV 2025, sehingga total capaian hingga Triwulan IV 2025 adalah 7/ 11 indikator program pemda = 63,64%.

Kinerja Tujuan Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025**

Indikator Tujuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode* /Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase bahan kebijakan yang	42,5	60	63,64 (Terealisasi 7	106,07 (63,64/60*100%)	100	63,64% belum tercapai

Indikator Tujuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode* /Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
<p>mendukung program pemda</p> <p><u>Meta Indikator :</u></p> <p>Jumlah kebijakan yang mendukung program pemda di tahun bersangkutan terhadap total program pemda yang akan didukung di akhir periode.</p> <p>Penjelasan detail meta indikator:</p> <p>Terdapat 5 (lima) Program Pemda yang diukur dengan 11 (sebelas) indikator, meliputi:</p> <p>I. Program Pemerataan Kesejahteraan yang terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Indikator Indeks Gini dan Indikator Persentase Desa Mandiri.</p> <p>II. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan yang terdiri dari 3 (tiga)</p>			<p>indikator dari total 11 indikator terdiri dari 3 indikator program pemda tahun 2024 + 4 indikator program pemda Triwulan IV 2025, sehingga total capaian hingga Triwulan IV 2025 adalah 7/ 11 indikator program pemda = 63,64%.)</p>			<p>(Terealisasi 7 indikator dari total 11 indikator terdiri dari 3 indikator program pemda tahun 2024 + 4 indikator program pemda Triwulan IV 2025, sehingga total capaian hingga Triwulan IV 2025 adalah 7/ 11 indikator program pemda = 63,64%.)</p>

Indikator Tujuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode* /Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
<p>Indikator yakni Indikator Harapan lama sekolah, Indikator Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Literasi Memenuhi Kompetensi Minimum dan Indikator Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Numerasi Memenuhi Kompetensi Minimum.</p> <p>III. Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari 3 (tiga) indikator yakni Indikator Angka Harapan Hidup, Indikator Prevalensi Stunting dan Indikator Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak.</p>						

Indikator Tujuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode* /Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
<p>IV. Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat yang terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Indikator Indeks Pemberdayaan Gender dan Indikator Total Fertility Rate.</p> <p>V. Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda yang terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Indikator Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional dan internasional).</p> <p>Target capaian ditetapkan secara bertahap dari tahun 2024 hingga 2027 sebagai hasil akumulasi dari jumlah indikator program perangkat daerah yang berhasil dicapai.</p> <p>Pada tahun 2024 (baseline), target sebesar 40% dicapai melalui 3</p>						

Indikator Tujuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode* /Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
<p>dari 7 indikator program yang dilaksanakan oleh Biro Bina Mental Spiritual.</p> <p>Selanjutnya, pada tahun 2025 target meningkat menjadi 60%, yaitu 7 dari 11 indikator program Biro Kesejahteraan Rakyat.</p> <p>Pada tahun 2026, target capaian naik menjadi 80% dengan pencapaian 9 dari 11 indikator, dan akhirnya pada tahun 2027 ditargetkan mencapai 100% dengan keberhasilan seluruh 11 indikator program perangkat daerah.</p>						

\* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

Analisis Ketercapaian Tujuan : Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat adalah sebagai berikut:erwujudnya Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang istimewa dengan memperhatikan bentuk dan susunan Pemerintahan Asli adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 63,64%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target 60% yaitu sebesar 106,07% (terlampau).
- b. Realisasi tahun ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah, dari Biro Bina

Mental Spiritual Setda DIY menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY. Perubahan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, yang juga berdampak pada penyesuaian ketugasan.

c. Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 sebesar 106,07%.

**Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja**

- a. Ketepatan menganalisa kebutuhan kebijakan.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi yang intensif antar pemangku kepentingan
- c. Dukungan anggaran yang relatif mencukupi

**Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja**

- a. Tidak ada faktor penghambat.

**Analisis Faktor Risiko Ketidacapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian**

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	-			

Capaian indikator tujuan tersebut didukung oleh kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis, yakni Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama dan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah.

**1.1.2. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama**

Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

**Tabel III. 5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan detail dari Meta Indikator
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	Komposit rumusan bahan kebijakan yang menjadi draf kebijakan serta fasilitasi keagamaan	<p>1) Bidang Bina Mental = 1 rumusan bahan kebijakan.                  2) Pelayanan Dasar terdapat 7 rumusan bahan kebijakan = 3 subkegiatan x 2 dokumen (korsin dan money) + 1 dokumen kajian.                  3) Pelayanan Non Dasar terdapat 5 rumusan bahan kebijakan = 2 subkegiatan x 2 dokumen (korsin dan money) + 1 dokumen kajian.                  Maka total adalah 13 rumusan bahan kebijakan (akan menyesuaikan jumlah keluaran tahun berjalan).</p> <p>Hitungan capaian fasilitasi keagamaan :                  Fasilitasi Agama <math>4/4 \times 100\% = 100\%</math> Target</p> <p>Hitungan persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar yang menjadi naskah bahan kebijakan:                  Tahun 2025 = <math>8 \text{ dokumen tahun } n / 13 \text{ dokumen} + 100\% / 2 = 80\%</math>                  Tahun 2026 = <math>11 \text{ dokumen tahun } n / 13 \text{ dokumen} + 100\% / 2 = 90\%</math>                  Tahun 2027 = <math>13 \text{ dokumen tahun } n / 13 \text{ dokumen} + 100\% / 2 = 100\%</math></p>

Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan detail dari Meta Indikator
1	2	3	4
			<p>Perhitungan target capaian dilakukan secara tahunan dan bukan merupakan hasil akumulasi, melainkan berdasarkan pencapaian indikator pada tahun berjalan. Pada tahun 2025, capaian dihitung berdasarkan rasio 8 rumusan bahan kebijakan dari total 13 rumusan bahan kebijakan (menyesuaikan jumlah keluaran tahun berjalan) yang disyaratkan, ditambah dengan capaian fasilitasi keagamaan sebesar 100%, lalu dirata-rata, sehingga diperoleh nilai 80%.</p> <p>Selanjutnya, pada tahun 2026, capaian meningkat menjadi 90%, dihitung dari 11 rumusan bahan kebijakan dari total 13 rumusan bahan kebijakan (menyesuaikan jumlah keluaran tahun berjalan) ditambah capaian fasilitasi agama yang tetap 100%, kemudian dirata-rata.</p> <p>Pada tahun 2027, seluruh indikator berhasil dipenuhi dengan 13 rumusan bahan kebijakan dari 13 rumusan bahan kebijakan (menyesuaikan jumlah keluaran tahun berjalan) yang tersedia dan capaian fasilitasi agama tetap di angka 100%, sehingga menghasilkan nilai akhir sebesar 100%.</p> <p>Dengan demikian, setiap nilai tahunan merepresentasikan evaluasi mandiri atas pelaksanaan di tahun tersebut dan tidak menjumlahkan hasil tahun-tahun sebelumnya.</p>

1. Kinerja Sasaran OPD hingga Triwulan IV 2025 pada indikator persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring, dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, dan bidang non-pelayanan dasar, yang menjadi naskah bahan kebijakan dan fasilitasi keagamaan sebagai berikut:
  - a. Bahan kebijakan tersebut telah terselesaikan 14 dari 13 dokumen = 103,85% yang didukung oleh:

- Bidang Mental (1) SK Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2025 tentang Penetapan Petugas Haji Daerah DIY Tahun 2025; (2) SE Nomor B/100.3.4/971/SET tentang Jam Kerja Pegawai pada Bulan Ramadhan 1446 H/2025M di Lingkungan Instansi Pemerintah di DIY;
- Bidang Pelayanan Dasar (1) SK Gubernur DIY Nomor 116/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 282/KEP/2018 Tentang Pengurus Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya di Lingkungan Pemda DIY; (2) Policy Note Kajian Studi Kelayakan Pendirian SMK Paliyan; (3) Ingub DIY Nomor B/100.3.4/2130/BR.8 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kesehatan, Kebugaran, dan Keterampilan Nonteknis bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Istimewa Yogyakarta; (4) Policy Brief : Urgensi Penguatan Sistem Kesehatan Mental Terintegrasi di DIY Menuju Layanan Berkelanjutan dan Responsif; (5) SK Gubernur DIY Nomor 99/TIM/2025 Tentang Pembentukan Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria DIY; (6) SK Gubernur DIY Nomor 92/TIM/2025 Tentang Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat DIY; (7) Pergub DIY Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan.
- Bidang non pelayanan dasar : (1) Rancangan Pergub DIY tentang Fasilitasi Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan; (2) Rancangan Pergub DIY tentang Pelaksanaan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender; (3) SE Gubernur DIY Nomor 3310 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan dan Anak di DIY; (4) SE Gubernur DIY tentang Penguatan Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di DIY; (5) Policy Note Seni tradisi DIY : Arah Pemeliharaan dan Pengembangan;



**Gambar III.1. Beberapa Dokumen Kebijakan yang Dihasilkan Tahun 2020**

b. Perhitungan capaian fasilitasi keagamaan pada Triwulan IV yakni sebesar 100%, dengan rincian

1. Pembinaan Mental 5 Agama :
  - Islam: Pengajian dalam rangka Nuzulul Quran, Maulid nabi, hari santri,
  - Katolik: Natal, Paskah
  - Kristen: Natal, Paskah
  - Budha : Waisak
  - Hindu : Nyepi
2. Fasilitasi Penyelenggaraan Haji Daerah meliputi layanan petugas haji daerah (seleksi, pembekalan, pengiriman dan moneyv), pamitan dan mangayubagyo jamaah haji, serta penghantaran dan penjemputan jamaah haji di embarkasi.
3. Fasilitasi Festival Keagamaan yaitu: penyelenggaraan STQH Tk. Daerah, pelatihan rutin dan eksebisi serta pengiriman kafilah ke STQH Tk. Nasional; penyelenggaraan Pesparani Daerah di DIY; penyelenggaraan pelatihan kontingen Pesparawi Nasional 2026.
4. Fasilitasi Peribadatan dan Hibah Kelembagaan kepada 8 Lembaga/organisasi keagamaan (MUI DIY, BAZNAS DIY, PW NU DIY,

PW Muhammadiyah DIY, PGI DIY, Kevikepan, PHDI DIY, Walubi DIY);  
monev lembaga, sosialisasi Perda Pesantren

Sehingga perhitungan capaian s.d. Triwulan IV 2025:  $(107,69\% + 100\%)/2 = 103,85\%$ .



**Gambar III.2. Festival Keagamaan STQ Daerah**



**Gambar III.3. Festival Keagamaan STQ Nasional**



**Gambar III.4. Festival Keagamaan Pesparani Daerah**



**Gambar III.5. Pelatihan Pesparawi Nasional**



**Gambar III.6. Perayaan Nyepi**

Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama:

**Tabel III. 6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode* /Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan  <u>Meta Indikator :</u>  Komposit rumusan bahan kebijakan yang menjadi draf	160	80	103,85 (Bahan kebijakan tersebut telah terselesaikan 14 dari 13 dokumen (14/13*100 %=107,69 %)  pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama dari target 100 terealisasi	129,81 (103,85/80*100%)	100%	103,85% (103,85/100x100%)

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode* /Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
kebijakan serta fasilitasi keagamaan			100% atau dengan Persentase 100% ), maka perhitungannya (107,69% + 100%)/2 = 103,85% )			

\* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: terwujudnya kelembagaan istimewa yang agile adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 103,85%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 129,81% (terlampau).
- b. Realisasi tahun ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah, dari Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY. Perubahan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, yang juga berdampak pada penyesuaian ketugasan.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 sebesar 103,85%.

Keberhasilan capaian Sasaran 1, dengan Indikator Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut

**Tabel III. 7 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran**

1

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6
1. Program Kesejahteraan Rakyat		Rumusan kebijakan bidang bina mental, kesehatan, dan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	5 dokumen	9 dokumen	180
		Jumlah rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti (ex Bermas)	4 dokumen	5 dokumen	125
	1.1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		2 dokumen	2 dokumen	100
	1.1.1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	100
	1.1.2. Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	9 Lembaga	9 Lembaga	100
	1.2. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		9 dokumen	12 dokumen	133,33

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6
	<b>1.2.1.</b> Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	3 dokumen	3 dokumen	100
	<b>1.2.2.</b> Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	9 dokumen	9 dokumen	100
	1.3 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		15 dokumen	16 dokumen	106,67
	1.3.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	16 dokumen	16 dokumen	100

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	12 laporan	12 laporan	100
	2.1 Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya		12 laporan	12 laporan	100
	2.1.1 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	12 laporan	12 laporan	100
	Total Nilai yang mendukung Sasaran 1		<b>5.502.575.500</b>	<b>5.139.744.914</b>	<b>93,41%</b>

Capaian tersebut didukung dari:

- a. **Capaian Program Kesejahteraan Rakyat** menghasilkan bahan kebijakan yang telah terselesaikan 14 dari 13 dokumen = 107,69% yang didukung oleh:
1. SK Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2025 tentang Penetapan Petugas Haji Daerah DIY Tahun 2025;
  2. SE Nomor B/100.3.4/971/SET tentang Jam Kerja Pegawai pada Bulan Ramadhan 1446 H/ 2025M di Lingkungan Instansi Pemerintah di DIY;
  3. SK Gubernur DIY Nomor 116/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 282/KEP/2018 Tentang Pengurus Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya di Lingkungan Pemda DIY;
  4. Policy Note Kajian Studi Kelayakan Pendirian SMK Paliyan;
  5. Ingub DIY Nomor B/100.3.4/2130/BR.8 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kesehatan, Kebugaran, dan Keterampilan Nonteknis bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Policy Brief : Urgensi Penguatan Sistem Kesehatan Mental Terintegrasi di DIY Menuju Layanan Berkelanjutan dan Responsif;

7. SK Gubernur DIY Nomor 99/TIM/2025 Tentang Pembentukan Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria DIY;
8. SK Gubernur DIY Nomor 92/TIM/2025 Tentang Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat DIY;
9. Pergub DIY Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan.
10. Rancangan Pergub DIY tentang Fasilitasi Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan;
11. Rancangan Pergub DIY tentang Pelaksanaan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender;
12. SE Gubernur DIY Nomor 3310 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan dan Anak di DIY;
13. SE Gubernur DIY tentang Penguatan Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di DIY;
14. Policy Note Seni tradisi DIY : Arah Pemeliharaan dan Pengembangan;

Penjelasan disertai dokumentasi.

Serta perhitungan capaian fasilitasi keagamaan pada Triwulan IV yakni sebesar 100%, dengan rincian

1. Pembinaan Mental 5 Agama :
    - a. Islam: Pengajian dalam rangka Nuzulul Quran, Maulid nabi, hari santri,
    - b. Katolik: Natal, Paskah
    - c. Kristen: Natal, Paskah
    - d. Budha : Waisak
    - e. Hindu : Nyepi
  2. Fasilitasi Penyelenggaraan Haji Daerah meliputi layanan petugas haji daerah (seleksi, pembekalan, pengiriman dan monev), pamitan dan mangayubagyo jamaah haji, serta penghantaran dan penjemputan jamaah haji di embarkasi.
  3. Fasilitasi Festival Keagamaan yaitu: penyelenggaraan STQH Tk. Daerah, pelatihan rutin dan eksepsi serta pengiriman kafilah ke STQH Tk. Nasional; penyelenggaraan Pesparani Daerah di DIY; penyelenggaraan pelatihan kontingen Pesparawi Nasional 2026.
  4. Fasilitasi Peribadatan dan Hibah Kelembagaan kepada 8 Lembaga/organisasi keagamaan (MUI DIY, BAZNAS DIY, PW NU DIY, PW Muhammadiyah DIY, PGI DIY, Kevikepan, PHDI DIY, Walubi DIY); monev lembaga, sosialisasi Perda Pesantren.
- b. Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan telah terealisasi sebanyak 12 laporan. Terkait TUK (Target Ukuran Kegiatan) pada sub kegiatan, terdapat beberapa penyesuaian, yaitu :
- Pengurangan kegiatan: Pesparawi Nasional dan Peringatan Isra' Miraj
  - Penambahan kegiatan: Persiapan Pesparawi Nasional

Penyesuaian ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan prioritas program.

Rincian dari 12 laporan tersebut adalah :

1. Laporan Pesparani Daerah
2. Laporan STQ Daerah dan Nasional
3. Laporan Pelatihan persiapan Kontingen Pesparawi Nasional
4. Laporan Hari Santri,
5. Laporan Natal,
6. Laporan Nyepi,
7. Laporan Paskah,
8. Laporan Waisak,
9. Laporan Maulid Nabi
10. Laporan Nuzulul Quran
11. Laporan Kampung Berkah
12. Laporan Pembinaan Mental (Pengajian Pejabat Aparat)



**Gambar III.7. Perayaan Paskah**



**Gambar III.8. Perayaan Waisak**



**Gambar III.9. Perayaan Maulid Nabi**





**Gambar III.12. Perayaan Hari Santri**

#### **Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja**

- a. Ketersediaan dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat yang memberikan cukup keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyusun regulasi terkait kesejahteraan rakyat
- b. Komitmen dan pemahaman yang semakin baik dari para stakeholder terkait perumusan bahan kebijakan strategis
- c. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun Dana Keistimewaan, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.

#### **Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja**

- a. Tidak ada faktor penghambat.

**Analisis Faktor Risiko Ketidacapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian**

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	-			

### 1.1.3. Sasaran 2 : Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah diukur dengan Indikator dan meta indikator sebagai berikut:

**Tabel III. 8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan detail dari Meta Indikator
1	2	3	4
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun-n	Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah</li> <li>2. Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah</li> </ol>

Sumber data diolah dari Hasil Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada 38 (tiga puluh delapan) OPD. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025, menggunakan indikator yang dirumuskan oleh Perangkat Daerah *Leading Sector*/Koordinator Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 358 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu dan mempertimbangkan beberapa ketentuan dari Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025.

Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 menggunakan skema dan bobot nilai sebagai berikut:

**Tabel III. 4 Skema dan bobot nilai Evaluasi Reformasi Perangkat Daerah**

No	Uraian	Bobot	Keterangan
I. Reformasi Birokrasi General			
A	Strategi Pelaksanaan RB General	10	1 indikator
B	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40	
	Sasaran 1 : Tata Kelola pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif	32	12 indikator
	Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	8	2 indikator
C	Capaian sasaran Strategis RB	50	
	Sasaran 1 : Tata Kelola pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif	28	4 indikator
	Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	22	3 indikator
Total RB General		100	
II. Reformasi Birokrasi Tematik			
A	Capaian Evaluasi RB Tematik Pengentasan Kemiskinan	5	5 indikator
B	Capaian Evaluasi RB Tematik Peningkatan Investasi	5	2 indikator
C	Capaian Evaluasi RB Tematik Pengendalian Inflasi	5	3 indikator
D	Capaian Evaluasi RB Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri	5	1 indikator
E	Capaian Evaluasi RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan ( <i>Stunting</i> )	5	5 indikator
Total RB Tematik		20	
Total Nilai RB		120	

Sumber data: Biro Organisasi Setda DIY

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel III. 5 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025**

No	Unit Kerja	Nilai Total RB General 2025	Nilai Total RB Tematik 2025	INDEKS RB 2025	Kategori	Predikat	Nilai Total RB General 2024	Nilai Total RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	GAP
1	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	87,14	8,77	95,90	A	Memuaskan	86,95	8,92	95,87	0,03
2	Biro Hukum Setda DIY	84,08	6,83	90,91	A	Memuaskan	84,28	5,85	90,13	0,78
3	Biro Organisasi Setda DIY	86,61	10,10	96,71	A	Memuaskan	87,57	9,06	96,63	0,08
4	Biro Umum dan Protokol Setda DIY	86,15	5,73	91,88	A	Memuaskan	83,26	5,18	88,44	3,45
5	Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY	85,41	12,67	98,08	A	Memuaskan	83,51	10,23	93,74	4,33
6	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	84,31	7,65	91,96	A	Memuaskan	86,60	6,88	93,48	- 1,52
7	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	82,23	11,05	93,28	A	Memuaskan	83,78	8,29	92,07	1,21
8	Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda DIY	85,25	7,39	92,64	A	Memuaskan	n/a	n/a	n/a	n/a
9	Paniradya Kaistimewan	85,47	10,99	96,46	A	Memuaskan	84,31	9,68	93,99	2,46
10	Sekretariat DPRD DIY	83,78	5,96	89,74	A	Memuaskan	83,65	5,11	88,76	0,98
11	Inspektorat DIY	88,75	9,42	98,17	A	Memuaskan	89,25	6,99	96,24	1,93
12	Dinas Pariwisata DIY	86,27	9,75	96,02	A	Memuaskan	84,64	8,51	93,15	2,87
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	87,94	13,06	101	AA	Sangat Memuaskan	86,95	12,05	99	2
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	82,98	14,46	97,44	A	Memuaskan	84,07	11,40	95,47	1,98
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	84,21	15,70	99,91	A	Memuaskan	85,45	12	97,45	2,46
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	85,92	12,81	98,73	A	Memuaskan	84,94	7,61	92,55	6,18

N o	Unit Kerja	Nilai Total RB General 2025	Nilai Total RB Tematik 2025	INDEKS RB 2025	Kategori	Predikat	Nilai Total RB General 2024	Nilai Total RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	GAP
17	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	83,41	16,34	99,75	A	Memuaskan	85,22	11,94	97,16	2,59
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	85,16	11,41	96,57	A	Memuaskan	85,47	8,46	93,93	2,64
19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	83,02	15,81	98,83	A	Memuaskan	83,49	12,39	95,88	2,95
20	Dinas Perhubungan DIY	83,96	12,24	96,20	A	Memuaskan	82,98	7,19	90,17	6,02
21	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana) DIY	84,63	11,69	96,32	A	Memuaskan	83,26	7,38	90,64	5,68
22	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	87,15	13,27	100,42	AA	Sangat Memuaskan	86,94	12,54	99,48	0,94
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY	85,06	11,44	96,50	A	Memuaskan	85,06	7,55	92,61	3,89
24	Dinas Kesehatan DIY	85,44	15,09	100,53	AA	Sangat Memuaskan	87,83	9,64	97,47	3,07
25	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	85,45	13,73	99,18	A	Memuaskan	82,52	9,94	92,46	6,73
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	88,32	10,42	98,74	A	Memuaskan	89,36	6,94	96,30	2,44
27	Dinas Sosial DIY	86,90	13,56	100,46	AA	Sangat Memuaskan	86,52	8,74	95,26	5,20
28	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	83	10,32	93,32	A	Memuaskan	82,61	6,29	88,90	4,42
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY	85,77	12,01	97,78	A	Memuaskan	85,13	9,11	94,24	3,54

No	Unit Kerja	Nilai Total RB General 2025	Nilai Total RB Tematik 2025	INDEKS RB 2025	Kategori	Predikat	Nilai Total RB General 2024	Nilai Total RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	GAP
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY	83,08	12,03	95,11	A	Memuaskan	n/a	n/a	n/a	n/a
31	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	81,37	8,76	90,13	A	Memuaskan	80,52	4,55	85,07	5,07
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah DIY	86,64	12,86	99,50	A	Memuaskan	88,83	10,25	99,08	0,42
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	85,79	9,72	95,50	A	Memuaskan	87,67	7,22	94,89	0,61
34	Badan Kepegawaian Daerah DIY	88,12	9,46	97,58	A	Memuaskan	89,65	7,04	96,69	0,89
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	86,37	10,48	96,85	A	Memuaskan	88,09	8,04	96,13	0,72
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	85,46	8,51	93,97	A	Memuaskan	85,71	5,65	91,36	2,61
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	82	7,97	89,96	A	Memuaskan	80,83	6,33	87,16	2,80
38	Badan Penghubung Daerah DIY	81,41	7,82	89,23	A	Memuaskan	84,30	4,13	88,43	0,80
<b>Rata-Rata</b>		<b>85,11</b>	<b>10,98</b>	<b>96,09</b>			<b>85,31</b>	<b>8,31</b>	<b>93,62</b>	<b>2,47</b>

Sumber data: Biro Organisasi Setda DIY Januari 2026

**Tabel III. 6 Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2025 berdasar PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi**

No	Kriteria	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	> 100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK

No	Kriteria	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
2	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
4	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
6	C	>30 - 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
7	D	0 -30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK

Sumber data: PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

Kinerja sasaran Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III. 9 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode* /Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A (92,07)	A (92,08)*	A (93,28) (Hasil Evaluasi RB Perangkat Daerah Tahun 2025)	101,30% (93,28/92,08 x100%)	A (92,10)*	101,28% (93,28/92,10 x 100%)
<u>Meta Indikator :</u> Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun-n  <u>Penjelasan detail dari Meta Indikator:</u> Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan : 1. Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah 2. Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah						

\* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

### Analisis Ketercapaian Sasaran 2 : Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

- a. Berdasarkan hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY mendapatkan nilai skor Indeks RB Perangkat daerah 93,28 dengan Kategori A (Memuaskan);
- b. Target tahun 2025 92,08 realisasi 93,28, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 101,30% (terlampau).
- c. Realisasi tahun ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah, dari Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY. Perubahan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, yang juga berdampak pada penyesuaian ketugasan.

d. Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 101,28%.

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator Kategori RB Perangkat Daerah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel III. 10 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2**

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,58	92,15	101,73
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100
	2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
	4. Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	2 Paket	2 Paket	100

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan			
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah				
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	100
	3. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	100

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	32 Unit	100
	5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	100
	Total Anggaran Pendukung		<b>339.264.500</b>	<b>258.626.108</b>	<b>76,23</b>

Capaian tersebut didukung dari **Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** yang didukung oleh nilai PKKI yang baik.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan meliputi:

**Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja**

- a. Koordinasi internal dan eksternal yang baik
- b. Dukungan anggaran baik melalui APBD
- c. Teknologi dan informasi penunjang kegiatan yang mendukung

**Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja**

- a. Tidak ada hambatan berarti

**Analisis Faktor Risiko Ketidacapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian**

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	-	-	-	-

### 3.2. Capaian Kinerja Lainnya

#### a. Capaian Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Lainnya

**Tabel III. 11. Capaian Kinerja yang Mendukung Upaya Pengentasan Kemiskinan**

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Penerima	Keluaran	Hibah (Rp)	Sumber	Lokasi
	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Baznas DIY	1 Penerima	200.000.000	APBD	DI Yogyakarta
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Kampung Berkah	1 laporan	100.000.000	Dana Keistimewaan	Kalurahan Selopamiro dan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kab. Bantul

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY mendukung program penanggulangan kemiskinan melalui penyaluran bantuan hibah ke Baznas DIY. Dana yang disalurkan ke Baznas DIY digunakan untuk operasional kelembagaan terkait penanggulangan kemiskinan. Sehingga dalam hal ini, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY tidak secara langsung menangani permasalahan kemiskinan, tetapi berkolaborasi dengan Baznas DIY.

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY juga turut melaporkan Indeks Zakat Nasional yang dikelola oleh Baznas sebagai bagian dari indikator kinerja. Indikator tersebut merupakan hasil penyelarasan terhadap mandatori indikator yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga, serta tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

No.	Program Perangkat Daerah	Indikator	2025	2026	2027
1	Program Kesejahteraan Rakyat	Indeks Zakat Nasional	0,69	0,71	0,74

Selain itu, terdapat kegiatan Kampung Berkah yaitu pembinaan kelompok masyarakat serta pemberian Bantuan Keuangan Khusus yang diserahkan langsung oleh BPKA kepada Pemerintah Kalurahan Wukirsari. Dalam hal ini Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY berperan dalam menginisiasi, monitoring, dan evaluasi.

### 3 Capaian Kinerja *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) melalui pelaksanaan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat. Dukungan tersebut terarah pada terwujudnya kehidupan sehat dan sejahtera melalui penguatan koordinasi kebijakan bidang kesehatan dan peningkatan akses pelayanan dasar; pendidikan berkualitas melalui fasilitasi dan sinkronisasi kebijakan pendidikan agar lebih inklusif dan merata; serta kesetaraan gender melalui dukungan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selain itu, Biro Kesra juga mendukung terwujudnya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi kebijakan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat, dan tenaga kerja; berkurangnya kesenjangan melalui penguatan kebijakan sosial yang berpihak pada kelompok rentan; serta pembangunan kota dan permukiman yang berkelanjutan melalui pelestarian budaya dan penguatan nilai-nilai luhur sebagai bagian dari pembangunan berbasis keistimewaan DIY. Dukungan terhadap perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh diwujudkan melalui pembinaan mental spiritual, penguatan kelembagaan keagamaan, serta sinergi lintas sektor dalam menjaga harmoni sosial.

Secara keseluruhan, peran Biro Kesejahteraan Rakyat terimplementasi melalui peningkatan akses pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; penguatan kelembagaan spiritual; pemberdayaan perempuan, anak, dan pemuda; serta pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal. Upaya ini mendukung terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif, berkeadilan, berbudaya, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, upaya yang dilakukan terakomodir melalui :

**1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan,**

*Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya* dan Subkegiatan *Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat*, diarahkan pada penguatan internalisasi nilai budaya, pelestarian tradisi, serta fasilitasi lembaga budaya sebagai bagian dari pembangunan karakter dan identitas keistimewaan DIY.

Penguatan tersebut juga disinergikan dengan kegiatan fasilitasi keagamaan, meliputi penyelenggaraan festival keagamaan, peringatan hari besar keagamaan, pembinaan mental spiritual, serta dukungan BKK Kampung Berkah. Kegiatan ini bertujuan memperkuat harmoni sosial, meningkatkan ketahanan spiritual masyarakat, serta mendorong peran aktif komunitas dan lembaga keagamaan dalam membangun kesejahteraan berbasis nilai-nilai luhur dan kearifan lokal DIY. Melalui integrasi nilai budaya dan nilai spiritual tersebut, diharapkan tercipta masyarakat DIY yang berkarakter, rukun, dan berdaya saing, dengan tetap menjaga identitas keistimewaan sebagai fondasi pembangunan daerah.

**2. Program Kesejahteraan Rakyat,**

Melalui Kegiatan *Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual*, Subkegiatan *Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual* serta *Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual*, dengan aktivitas dukungan sarana prasarana keagamaan, penguatan kelembagaan spiritual, dan pembinaan mental masyarakat guna memperkuat harmoni sosial.

**3. Program Kesejahteraan Rakyat,**

melalui Kegiatan *Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar* Subkegiatan:

- *Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan*
- *Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan*
- *Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial*

dengan aktivitas koordinasi lintas OPD, sinkronisasi kebijakan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja guna memastikan pelayanan dasar berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

4. **Program Kesejahteraan Rakyat**, melalui Kegiatan *Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar*, Subkegiatan: *Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata*

- o *Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja*

dengan aktivitas penguatan sinergi kebijakan lintas sektor untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesetaraan, pemberdayaan masyarakat, dan stabilitas sosial.

Melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut, Biro Kesejahteraan Rakyat berperan sebagai koordinator dan fasilitator kebijakan kesejahteraan rakyat dalam mendukung terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif, berkeadilan, berbudaya, dan berkelanjutan.

**4 Capaian Kinerja Program Prioritas Pemda DIY**

No	Program Pemda	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Tahun 2025	Realisasi s.d. TW III 2025	Keterangan
1.	Program Pemerataan Kesejahteraan	a. Indeks Gini	Indeks	0,415	0,426	Data 25 Juli 2025 -BPS
2.	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	a. Harapan Lama Sekolah	Indeks	15,76	15,70	Data 2024 - BPS
		b. Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Literasi Memenuhi Kompetensi Minimum	%	77,38	81,98	Data 2024 - Dikpora
		c. Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Numerasi Memenuhi Kompetensi Minimum	%	60,52	73,89	Data 2024 - Dikpora
3.		Angka harapan Hidup	Indeks	75,21	75,36	Data TW III 2025 - BPS

No	Program Pemda	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Tahun 2025	Realisasi s.d. TW III 2025	Keterangan
	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	%	12,90	10,6	Dinas Kesehatan
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Dasar Layak	%	98,802	96,83	Data 2024 - DPUPESDM
4.	Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat	a. Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	77,67	74,65	Data April 2025 - BPS
		b. Total Fertility Rate (TFR)	Indeks	1,8 – 2,2	1,83	Data 2024 - BKKBN
5.	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	a. Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi oleh Pihak Luar Pemda DIY (Regional, Nasional, Internasional)	Jumlah	355	399	Data 2024 - Dinas Kebudayaan
7.	Program Peningkatan Kualitas Demokrasi	1.1. Aspek Kebebasan	Indeks	74,91	88,74	Data 2025 - BPS
		1.2. Aspek Kesenjangan	Indeks	87,89	90,58	Data 2025 - BPS

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY mendukung berbagai program prioritas Pemerintah Daerah DIY yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan manusia. Dukungan tersebut antara lain pada Program Pemerataan Kesejahteraan melalui indikator Indeks Gini sebagai ukuran ketimpangan; Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan melalui indikator Harapan Lama Sekolah serta capaian asesmen literasi dan numerasi jenjang pendidikan menengah; serta Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat melalui indikator Angka Harapan Hidup, Prevalensi Stunting, dan persentase penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak.

Selain itu, Biro Kesra juga berkontribusi pada Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat melalui indikator Indeks Pemberdayaan Gender dan Total Fertility Rate (TFR), Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda melalui indikator jumlah budaya yang diapresiasi di tingkat regional, nasional, dan internasional, serta Program Peningkatan Kualitas Demokrasi melalui indikator Aspek Kebebasan dan Aspek Kesetaraan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor dalam lingkup kesejahteraan rakyat.

### 5 Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemda DIY dan Program Pemda DIY

Sebagaimana amanat cascading kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program Pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut :

**Tabel III. 12 Kontribusi Tujuan dan Sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah DIY**

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator	Target	Realisasi	%Realisasi	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi	%Realisasi
1.	Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	1. Angka Kemiskinan	9,66	10,23	94,09	A.Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda	60%	63,64 %	106,07
						1.Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang	Persentase hasil kajian, koordinasi,m	80%	103,85 %	129,81

						bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitas kehidupan beragama	onitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar yang menjadi naskah bahan kebijakan dan fasilitasi keagamaan			
						2.Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A (92,08)	A (93,28)	101,30

Sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY memiliki keterkaitan erat dengan sasaran Pemerintah Daerah DIY, yaitu semakin kecilnya tingkat kemiskinan. Berdasarkan data pada tabel, Angka Kemiskinan ditargetkan sebesar 9,66 dan terealisasi sebesar 10,23 dengan capaian kinerja 94,09%, sehingga diperlukan dukungan kebijakan dan tata kelola yang semakin optimal. Kontribusi Biro Kesra dalam mendukung sasaran tersebut tercermin melalui capaian indikator kinerja perangkat daerah yang sebagian besar melampaui target. Keterkaitan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda mencapai 63,64% dari target 60%, dengan capaian kinerja sebesar 106,07%, menunjukkan dukungan nyata dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
2. Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring, dan evaluasi yang menjadi bahan kebijakan dan fasilitasi keagamaan mencapai 103,85% dari target 80%, dengan capaian kinerja sebesar 129,81%, yang mencerminkan kualitas perumusan kebijakan yang sangat baik dan berbasis data.
3. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan strategis di bidang bina mental, pelayanan dasar, dan non pelayanan dasar berperan dalam menghasilkan program yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung penurunan kemiskinan.
4. Indikator reformasi birokrasi perangkat daerah berada pada kategori A dengan nilai 93,28 dari target 92,08, serta capaian kinerja sebesar 101,30%, menunjukkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
5. Tata kelola yang efektif dan akuntabel mendukung kelancaran implementasi program kesejahteraan rakyat sehingga memberikan dampak terhadap upaya pengendalian angka kemiskinan.
6. Meskipun capaian indikator kemiskinan belum mencapai target (94,09%), kinerja Biro Kesra yang melampaui target pada berbagai indikator internal menjadi faktor pendukung penting dalam upaya penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

**Tabel III. 13 Kontribusi Program Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah DIY**

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator	Target	Realisasi	%Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi	%Realisasi
1.	Program Pemerataan Kesejahteraan	Persentase Desa Mandiri	69,9	97	129,56	Program Kesejahteraan Rakyat	Rumusan kebijakan bidang bina mental, kesehatan, dan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	4	5	125%
	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak.	98,802	97,14	98,32	Program Kesejahteraan Rakyat	Rumusan kebijakan bidang bina mental, kesehatan, dan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	5	9	180%
2	Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender	77,67	74,65	96,11%	Program Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	5	9	180%
3	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (Regional, nasional internasional)	355	460	129,58%	Program Kesejahteraan Rakyat	Rumusan kebijakan bidang bina mental, kesehatan, dan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	4	5	125%

**Penjelasan :**

1. Biro Kesra mendukung 5 program pemda yang diukur dengan 11 indikator program pemda.

2. Pada tahun 2024 telah terealisasi 3 indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Prevalensi Stunting.
3. Hingga Triwulan IV 2025, Biro Kesejahteraan Rakyat telah melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD yang mendukung 4 indikator program pemda (poin a-d) terdiri dari :
  - a. Persentase Desa Mandiri
    - Peraturan Gubernur DIY Nomor 9/2025 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan tanggal 24 Februari 2025.
  - b. Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak
    - SK Gubernur DIY Nomor 116/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 282/KEP/2018 Tentang Pengurus Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya di Lingkungan Pemda DIY tanggal 21 Maret 2025.
    - SK Gub DIY Nomor 92/TIM/2025 tentang Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat DIY tanggal 3 Juli 2025.
    - SK Gubernur DIY Nomor 99/TIM/2025 Tentang Pembentukan Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria DIY tanggal 21 Juli 2025.
  - c. Indeks Pemberdayaan Gender.
    - SE Gubernur DIY Nomor 3310/2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan dan Anak di DIY tanggal 8 Oktober 2025.
  - d. Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (Regional, nasional, internasional) :
    - Surat Rekomendasi Sekretaris Daerah DIY kepada Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY perihal Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan dan Pengembangan Seni Tradisi di DIY Nomor B/400.6.1/4248/BR.8 tanggal 22 Desember 2025.

### 3.3. Analisis Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel III. 14 Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran Belanja dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp) %
			Target*	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Tujuan: Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda	60*	63,64	106,07	5.841.840.000	5.398.371.022	92,41	Rp443.468.978 (7,59%)
1.	Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitas kehidupan beragama	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	80*	103,85	129,81	5.502.575.500	5.139.744.914	93,41	Rp362.830.586 (6,59%)
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	(A) 92,08*	(A) 93,28	101,30	339.264.500	258.626.108	76,23	Rp80.638.392 (23,77%)
<b>Jumlah</b>						5.841.840.000	5.398.371.022	92,41	Rp443.468.978 (7,59%)

Sumber: <http://sungguh.jogjaprovo.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY Tahun 2025, Laporan Keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian tujuan dan sasaran sebesar Rp5.841.840.00, terealisasi Rp5.398.371.022 atau 92,41% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

Terdapat efisiensi Rp443.468.978 atau 7,59% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Selisih Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dalam SHBJ Daerah

### **3.4. Inovasi**

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Pemanfaatan Media Sosial (Instagram) dan Website.

Pemanfaatan media sosial Instagram dan website resmi menjadi sarana publikasi dan diseminasi informasi kegiatan secara terbuka dan real time. Melalui platform ini, Biro Kesejahteraan Rakyat dapat menyampaikan informasi program, jadwal kegiatan, pengumuman bantuan, dokumentasi pelaksanaan, hingga capaian kinerja. Inovasi ini meningkatkan transparansi, memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas publik.

2. Pemanfaatan Aplikasi Posbindu Satriya.

Aplikasi Posbindu Satriya dimanfaatkan untuk mempermudah pendataan anggota Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), termasuk pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan rekam medis sederhana. Digitalisasi ini meningkatkan ketepatan data, kemudahan monitoring perkembangan kesehatan anggota, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

3. Pemanfaatan Aplikasi SIMBAH.

Aplikasi SIMBAH digunakan untuk mendata rumah ibadah yang mengajukan dan terdaftar sebagai pemohon dana hibah. Sistem ini membantu proses verifikasi, validasi, serta pemantauan status pengajuan secara lebih tertib dan terdokumentasi. Inovasi ini mendukung transparansi, efisiensi proses administrasi, serta memudahkan penyusunan laporan bantuan hibah.

#### 4. Pemanfaatan Portal Lawang Ngarep.

Portal Lawang Ngarep dikembangkan sebagai pusat integrasi data dan informasi dalam satu portal terpadu. Portal ini berfungsi sebagai sumber data utama yang menghimpun berbagai informasi program, data penerima bantuan, regulasi, serta dokumentasi kegiatan dalam satu sistem yang mudah diakses. Dengan adanya Lawang Ngarep, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan berbasis data terpusat, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan terintegrasi.

### 3.5. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY sebagaimana *cascading* kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Rasionalisasi* anggaran. Inventarisasi Lintas Sektor Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY adalah sebagai berikut:

**Tabel III. 15 Inventarisasi Lintas Sektor Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY**

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran	
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran		
1.	Koordinasi penyaluran Hibah Rumah Ibadah dan Lembaga Keagamaan		Kanwil Kemenag DIY, Instansi Vertikal, OPD DIY, Panitia hari besar keagamaan, Lembaga keagamaan dan Pengurus/Takmir Tempat Ibadah	berperan aktif dalam koordinasi penyusunan rencana kegiatan hingga pelaksanaan dan pelaporan kegiatan	Dokumen laporan pertanggungjawaban kegiatan hibah dari masing-masing unit rumah ibadah dan lembaga keagamaan	<p>Koordinasi persiapan penyaluran hibah rumah ibadah di DIY dan 8 lembaga keagamaan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAZNAS DIY</li> <li>2. PWNUI DIY</li> <li>3. PW Muhammadiyah</li> <li>4. MUI DIY</li> <li>5. Kevikepan DIY</li> <li>6. Walubi DIY</li> <li>7. PHDI DIY</li> <li>8. PGI DIY</li> </ol>	<p>Bagi OPD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama.</li> <li>2. Mendukung pencapaian kinerja Program Kesejahteraan Rakyat.</li> </ol> <p>Bagi Kelompok Sasaran :</p> <p>Mendukung kelayakan sarana dan prasarana rumah ibadah di DIY serta mendukung kegiatan operasional keagamaan di tiap lembaga keagamaan di DIY.</p>

2.	Kajian Kesehatan Jiwa		Dinkes, Bapperida, Dinsos, BPKA, Dinkes Kab Kota, Puskesmas kab kota, NGO, Univ proklamasi 45, Universitas Jendral Ahmadyani Yogyakarta, Universitas Sarjanawiyata Tamasiswa	Dalam kajian kesehatan jiwa, kontribusi perangkat daerah terwujud melalui penyediaan data dan gambaran kondisi faktual di lapangan sebagai dasar analisis, pengayaan perspektif sosial dan kesejahteraan masyarakat, penyelarasan dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah, serta dukungan pada aspek pembiayaan agar rekomendasi yang dihasilkan realistis dan implementatif. Sinergi tersebut memastikan kajian tidak hanya bersifat konseptual, tetapi menjadi rujukan strategis dalam perumusan kebijakan yang terukur, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Laporan Hasil Kajian Kesehatan Jiwa	Masyarakat DIY	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama.</li> <li>2. Mendukung pencapaian kinerja Program Kesejahteraan Rakyat.</li> </ol> <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <p>Mendapatkan dukungan dalam peningkatan kesehatan jiwa di masyarakat.</p>
3.	Kajian Penanganan		Dinas Sosial DIY Dinas Pemberdayaan Perempuan,	Dalam kajian penanganan gelandangan dan	Laporan Kajian Penanganan	Masyarakat DIY	<p>Bagi OPD:</p>

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran	
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran		
	Gelandangan dan Pengemis		<p>Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY Dinas Kesehatan DIY Bapperida DIY Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY.</p>	<p>pengemis (gepeng) di DIY, seluruh perangkat daerah terkait bergerak secara terpadu untuk memastikan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya dilakukan melalui penjangkauan dan asesmen sosial, rehabilitasi serta pemberdayaan, perlindungan bagi kelompok rentan, layanan kesehatan fisik dan mental, hingga pemenuhan administrasi kependudukan agar akses terhadap layanan dasar dapat terpenuhi. Keseluruhan langkah tersebut diselaraskan dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga penanganan tidak berhenti pada penertiban, tetapi berorientasi pada pemulihan martabat dan kemandirian sosial.</p>	Gelandangan dan Pengemis		<p>1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama.</p> <p>2. Mendukung pencapaian kinerja Program Kesejahteraan Rakyat.</p> <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <p>Mendapatkan dukungan dalam penanganan gelandangan dan pengemis di DIY.</p>

4.	Kajian Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Perempuan dan Anak di DIY.		Dinas Sosial DIY Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY Dinas Kesehatan DIY Bapperida DIY, BPKA.	Dalam kajian pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada perempuan dan anak di DIY, kontribusi perangkat daerah terwujud melalui penyediaan data dan potret kondisi riil korban, penguatan perspektif perlindungan dan kesejahteraan sosial, serta analisis dampak kesehatan fisik dan psikologis sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan. Kajian juga diperkaya dengan penyelarasan terhadap arah pembangunan daerah agar isu perlindungan perempuan dan anak menjadi prioritas strategis, sekaligus didukung melalui telaah aspek pembiayaan guna memastikan rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi aplikatif, terukur, dan berkelanjutan dalam implementasinya.	Laporan Kajian Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Perempuan dan Anak di DIY.	Masyarakat DIY	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama.</li> <li>2. Mendukung pencapaian kinerja Program Kesejahteraan Rakyat.</li> </ol> <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <p>Mendapatkan dukungan dalam penanganan pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada perempuan dan anak di DIY.</p>
----	--	--	---	---	--	----------------	---

5.	Kajian Studi Kelayakan Pendirian SMK Paliyan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Provinsi DIY / Kabupaten Gunungkidul), Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kapanewon Paliyan, Pemerintah Kalurahan di wilayah Paliyan, Tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, Bappeda (untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah)	Dalam Kajian Studi Kelayakan Pendirian SMK Paliyan, para pihak yang terlibat berkontribusi secara terpadu sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing. Perangkat daerah bidang pendidikan memberikan arahan teknis dan regulatif serta memastikan kesesuaian dengan kebijakan pendidikan daerah; perangkat daerah bidang ketenagakerjaan dan perindustrian menyediakan data kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi lokal sebagai dasar penentuan program keahlian; pemerintah kabupaten, kapanewon, dan kalurahan memfasilitasi dukungan kebijakan, data demografi, serta aspirasi masyarakat; Bappeda melakukan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan.	Laporan hasil kajian studi kelayakan pendirian SMK Paliyan	Masyarakat Kapanewon Paliyan	<p>Bagi OPD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia.</li> <li>2. Mendukung pencapaian kinerja Program Kesejahteraan Rakyat.</li> </ol> <p>Bagi Kelompok Sasaran :</p> <p>Mendapatkan dukungan dalam pendirian SMK Paliyan.</p>
----	--	--	---	--	--	------------------------------	---

4.	BKK Kampung Berkah		Pemerintah Kalurahan Wukirsari Bantul, Kelompok Patil Berkah, BAZNAS DIY, Paniradya Kaistimewaan dan BPKA.	Dalam pelaksanaan Program BKK Kampung Berkah, Pemerintah Kalurahan Wukirsari Bantul berperan sebagai kelompok sasaran sekaligus penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang mengimplementasikan program di tingkat kalurahan secara langsung dan bertanggung jawab terhadap pemanfaatan serta pelaporan kegiatan. Kelompok Patil Berkah berkontribusi sebagai pendamping teknis yang terlibat sejak tahap perencanaan program, penyediaan benih, pengelolaan kegiatan hingga strategi pemasaran hasil, sehingga memastikan program berjalan produktif dan berkelanjutan. BAZNAS hadir sebagai mitra strategis Biro Bina Mental dalam menginisiasi dan memperkuat konsep Kampung Berkah berbasis pemberdayaan umat	Laporan BKK dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung Berkah	Masyarakat Kalurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul	Manfaat bagi OPD :  1. Penguatan Peran Koordinatif dan Fasilitatif Program BKK Kampung Berkah memperkuat fungsi Biro dalam mengkoordinasikan kebijakan pembinaan mental spiritual dan pemberdayaan masyarakat berbasis nilai keagamaan dan kearifan lokal.  2. Peningkatan Kinerja dan Capaian Program Implementasi program secara langsung di tingkat kalurahan mendukung pencapaian indikator kinerja OPD, khususnya dalam bidang kesejahteraan rakyat, penguatan kelembagaan spiritual, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.  3. Penguatan Tata Kelola dan
----	--------------------------	--	--	---	---	---	---

				<p>dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Paniradya Kaistimewaan dan BPKA berperan sebagai penyedia, fasilitator, sekaligus verifikator anggaran BKK, memastikan tata kelola keuangan berjalan sesuai ketentuan, akuntabel, dan selaras dengan regulasi Dana Keistimewaan DIY.</p>			<p>Akuntabilitas Sinergi dengan Paniradya Kaistimewaan, BPKA, dan BAZNAS memperkuat tata kelola program yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi Dana Keistimewaan DIY.</p> <p>4. Model Replikasi Program Kampung Berkah dapat menjadi praktik baik (best practice) yang dapat direplikasi di kalurahan lain sebagai model pemberdayaan berbasis nilai spiritual dan ekonomi produktif.</p> <p>5. Penguatan Kolaborasi Multipihak Program ini memperkuat jejaring kemitraan antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, lembaga zakat, dan kelompok masyarakat.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							<p>Manfaat bagi Kelompok Sasaran (Kalurahan dan Masyarakat) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat memperoleh manfaat ekonomi melalui kegiatan produktif yang dikelola secara berkelanjutan, mulai dari penyediaan benih hingga pemasaran hasil.</li> <li>2. Penguatan Kapasitas dan Kemandirian Pendampingan teknis dari Kelompok Patil Berkah meningkatkan kapasitas masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan usaha, serta manajemen kelompok.</li> <li>3. Penguatan Nilai Spiritual dan Sosial Konsep Kampung Berkah</li> </ol>
--	--	--	--	--	--	--	---

							<p>mendorong integrasi nilai keagamaan dalam aktivitas ekonomi dan sosial, sehingga tercipta harmoni serta solidaritas antarwarga.</p> <p>4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan. Pemerintah Kalurahan memperoleh pengalaman dalam pengelolaan bantuan keuangan yang akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Keberlanjutan Program. Dengan dukungan kelembagaan dan kemitraan strategis, program tidak bersifat jangka pendek, tetapi berorientasi pada keberlanjutan dan pengembangan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
						jangka panjang.

5.	Sekretariat Program MBG		<p><b>Unsur Pembina (Forkopimda dan Instansi Vertikal)</b></p> <p>Terdiri dari Gubernur DIY, Ketua DPRD DIY, unsur Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Polda DIY, TNI (Darat, Laut, Udara), serta BIN DIY.</p> <p><b>Unsur Pimpinan Satgas</b></p> <p>Ketua: Sekretaris Daerah DIY</p> <p>Wakil Ketua: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat DIY</p> <p>Sekretaris: Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY.</p> <p><b>Unsur Kementerian/Lembaga Vertikal</b></p> <p>Meliputi Kanwil Kementerian Agama, BBPOM, serta unsur pelayanan pemenuhan</p>	<p>Unsur Pembina : <b>Peran:</b> Memberikan arahan strategis, dukungan kebijakan, serta pengawasan umum pelaksanaan program.</p> <p>Unsur Pimpinan Satgas :</p> <p><b>Peran:</b> Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan memastikan percepatan pelaksanaan program secara lintas sektor.</p> <p>Unsur Kementrian dan Lembaga Vertikal :</p> <p><b>Peran:</b> Dukungan teknis regulasi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, serta standar pemenuhan gizi.</p> <p>Unsur Perangkat Daerah :</p> <p><b>Peran:</b> Pelaksanaan teknis sesuai bidang urusan masing-masing, penganggaran, pengawasan,</p>	<p>Output kegiatan Sekretariat Program MBG adalah terbitnya <b>Surat Keputusan (SK) Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DIY</b> serta pembentukan <b>Kelompok Kerja (Pokja) MBG</b> sebagai perangkat operasional pelaksanaan program.</p> <p>SK Satgas Percepatan menjadi dasar hukum pelaksanaan koordinasi lintas sektor, penetapan susunan keanggotaan, serta pembagian tugas dan tanggung jawab para pihak dalam percepatan implementasi MBG. Sementara itu, Pokja MBG berfungsi sebagai tim teknis yang melaksanakan</p>	<p>Kelompok sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah peserta didik pada satuan pendidikan, termasuk PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA atau sederajat, serta santri pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan. Program ini juga memprioritaskan anak dari keluarga kurang mampu dan wilayah dengan risiko kerawanan pangan atau stunting, dengan satuan pendidikan sebagai lokus pelaksanaan kegiatan pemenuhan gizi.</p>	<p><b>Manfaat bagi OPD</b></p> <p>Program MBG memperkuat peran OPD dalam koordinasi lintas sektor bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketahanan pangan. Program ini mendukung pencapaian indikator kinerja daerah terkait penurunan stunting, peningkatan kualitas kesehatan peserta didik, serta penguatan tata kelola kolaboratif antarperangkat daerah. Selain itu, melalui Satgas dan Pokja MBG, terbangun sistem perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program yang lebih terintegrasi dan akuntabel.</p> <p><b>Manfaat bagi Kelompok Sasaran</b></p> <p>Program MBG memberikan manfaat langsung berupa pemenuhan asupan gizi yang lebih baik bagi peserta didik dan santri, sehingga mendukung pendidikan tumbuh kembang, kesehatan, serta konsentrasi belajar. Bagi keluarga, program ini membantu mengurangi beban pengeluaran</p>
----	-------------------------	--	---	---	--	--	--

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran	
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran		
			<p>gizi (KPPG dan SPPG).</p> <p><b>Unsur Perangkat Daerah DIY</b></p> <p>Meliputi Bappeda, BPKA, Inspektorat, serta dinas-dinas terkait (Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan, PUP-ESDM, PMK Dukcapil, Lingkungan Hidup, Kominfo, Tenaga Kerja, Perhubungan, Kesbangpol), serta Biro terkait di Setda DIY.</p>	<p>penyediaan data, distribusi, serta dukungan sarana prasarana.</p>	<p>koordinasi operasional, perencanaan aksi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program secara terstruktur dan berkelanjutan.</p>		<p>konsumsi harian. Secara jangka panjang, MBG berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pencegahan stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1.	Koordinasi penyaluran Hibah Rumah Ibadah dan Lembaga Keagamaan	Kanwil Kemenag DIY, Instansi Vertikal, OPD DIY, Panitia hari besar keagamaan, Lembaga keagamaan dan Pengurus/Takmir Tempat Ibadah	berperan aktif dalam koordinasi penyusunan rencana kegiatan hingga pelaksanaan dan pelaporan kegiatan	Dokumen laporan pertanggungjawaban kegiatan hibah dari masing-masing unit rumah ibadah dan lembaga keagamaan	<p>Koordinasi persiapan penyaluran hibah rumah ibadah di DIY dan 8 lembaga keagamaan yang meliputi:</p> <p>1. BAZNAS DIY</p> <p>2. PWNU DIY</p> <p>3. PW Muhammadiyah</p> <p>4. MUI DIY</p> <p>5. Kevikepan DIY</p> <p>6. Walubi DIY</p> <p>7. PHDI DIY</p> <p>8. PGI DIY</p>	<p>Bagi OPD :</p> <p>1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama.</p> <p>2. Mendukung pencapaian kinerja Program Kesejahteraan Rakyat.</p> <p>Bagi Kelompok Sasaran :</p> <p>Mendukung kelayakan sarana dan prasarana rumah ibadah di DIY serta mendukung kegiatan operasional keagamaan di tiap lembaga keagamaan di DIY.</p>

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
2.	Kajian Kesehatan Jiwa	Dinkes, Bapperida, Dinsos, BPKA, Dinkes Kab Kota, Puskesmas kab kota, NGO, Univ proklamasi 45, Universitas Jendral Ahmadyani Yogyakarta, Universitas Sarjanawiyata Tamasiswa	Dalam kajian kesehatan jiwa, kontribusi perangkat daerah terwujud melalui penyediaan data dan gambaran kondisi faktual di lapangan sebagai dasar analisis, pengayaan perspektif sosial dan kesejahteraan masyarakat, penyesuaian dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah, serta dukungan pada aspek pembiayaan agar rekomendasi yang dihasilkan realistis dan implementatif. Sinergi tersebut memastikan kajian tidak hanya bersifat konseptual, tetapi menjadi rujukan strategis dalam perumusan kebijakan yang terukur, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Laporan Hasil Kajian Kesehatan Jiwa	Masyarakat DIY	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama.</li> <li>2. Mendukung pencapaian kinerja Program Kesejahteraan Rakyat.</li> </ol> <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <p>Mendapatkan dukungan dalam peningkatan kesehatan jiwa di masyarakat.</p>

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
3.	Kajian Penanganan Gelandangan dan Pengemis	Dinas Sosial DIY Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY Dinas Kesehatan DIY Bapperida DIY Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY.	Dalam kajian penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di DIY, seluruh perangkat daerah terkait bergerak secara terpadu untuk memastikan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya dilakukan melalui penjangkauan dan asesmen sosial, rehabilitasi serta pemberdayaan, perlindungan bagi kelompok rentan, layanan kesehatan fisik dan mental, hingga pemenuhan administrasi kependudukan agar akses terhadap layanan dasar dapat terpenuhi. Keseluruhan langkah tersebut diselaraskan dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga penanganan tidak berhenti pada penertiban, tetapi berorientasi pada pemulihan martabat dan kemandirian sosial.	Laporan Kajian Penanganan Gelandangan dan Pengemis	Masyarakat DIY	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama.</li> <li>2. Mendukung pencapaian kinerja Program Kesejahteraan Rakyat.</li> </ol> <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <p>Mendapatkan dukungan dalam penanganan gelandangan dan pengemis di DIY.</p>

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
4.	Kajian Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Perempuan dan Anak di DIY.	Dinas Sosial DIY Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY Dinas Kesehatan DIY Bapperida DIY, BPKA.	Dalam kajian pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada perempuan dan anak di DIY, kontribusi perangkat daerah terwujud melalui penyediaan data dan potret kondisi riil korban, penguatan perspektif perlindungan dan kesejahteraan sosial, serta analisis dampak kesehatan fisik dan psikologis sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan. Kajian juga diperkaya dengan penyelarasan terhadap arah pembangunan daerah agar isu perlindungan perempuan dan anak menjadi prioritas strategis, sekaligus didukung melalui telaah aspek pembiayaan guna memastikan rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi aplikatif, terukur, dan berkelanjutan dalam implementasinya.	Laporan Kajian Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Perempuan dan Anak di DIY.	Masyarakat DIY	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama.</li> <li>2. Mendukung pencapaian kinerja Program Kesejahteraan Rakyat.</li> </ol> <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <p>Mendapatkan dukungan dalam penanganan pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada perempuan dan anak di DIY.</p>

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
5.	Kajian Studi Kelayakan Pendirian SMK Paliyan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Provinsi DIY / Kabupaten Gunungkidul), Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kapanewon Paliyan, Pemerintah Kalurahan di wilayah Paliyan, Tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, Bappeda (untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah)	Dalam Kajian Studi Kelayakan Pendirian SMK Paliyan, para pihak yang terlibat berkontribusi secara terpadu sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing. Perangkat daerah bidang pendidikan memberikan arahan teknis dan regulatif serta memastikan kesesuaian dengan kebijakan pendidikan daerah; perangkat daerah bidang ketenagakerjaan dan perindustrian menyediakan data kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi lokal sebagai dasar penentuan program keahlian; pemerintah kabupaten, kapanewon, dan kalurahan memfasilitasi dukungan kebijakan, data demografi, serta aspirasi masyarakat; Bappeda melakukan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan.	Laporan hasil kajian studi kelayakan pendirian SMK Paliyan	Masyarakat Kapanewon Paliyan	<p>Bagi OPD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia.</li> <li>2. Mendukung pencapaian kinerja Program Kesejahteraan Rakyat.</li> </ol> <p>Bagi Kelompok Sasaran :</p> <p>Mendapatkan dukungan dalam pendirian SMK Paliyan.</p>

4.	BKK Kampung Berkah	Pemerintah Kalurahan Wukirsari Bantul, Kelompok Patil Berkah, BAZNAS DIY, Paniradya Kaistimewaan dan BPKA.	<p>Dalam pelaksanaan Program BKK Kampung Berkah, Pemerintah Kalurahan Wukirsari Bantul berperan sebagai kelompok sasaran sekaligus penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang mengimplementasikan program di tingkat kalurahan secara langsung dan bertanggung jawab terhadap pemanfaatan serta pelaporan kegiatan. Kelompok Patil Berkah berkontribusi sebagai pendamping teknis yang terlibat sejak tahap perencanaan program, penyediaan benih, pengelolaan kegiatan hingga strategi pemasaran hasil, sehingga memastikan program berjalan produktif dan berkelanjutan. BAZNAS hadir sebagai mitra strategis Biro Bina Mental dalam menginisiasi dan memperkuat konsep Kampung Berkah berbasis pemberdayaan umat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Paniradya Kaistimewaan dan BPKA berperan sebagai penyedia, fasilitator, sekaligus verifikasi anggaran BKK, memastikan tata kelola keuangan berjalan sesuai ketentuan, akuntabel, dan selaras</p>	Laporan BKK dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung Berkah	Masyarakat Kalurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul	<p>Manfaat bagi OPD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Penguatan Peran Koordinatif dan Fasilitatif Program BKK Kampung Berkah memperkuat fungsi Biro dalam mengoordinasikan kebijakan pembinaan mental spiritual dan pemberdayaan masyarakat berbasis nilai keagamaan dan kearifan lokal.</li> <li>7. Peningkatan Kinerja dan Capaian Program Implementasi program secara langsung di tingkat kalurahan mendukung pencapaian indikator kinerja OPD, khususnya dalam bidang kesejahteraan rakyat, penguatan kelembagaan spiritual, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.</li> <li>8. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Sinergi dengan Paniradya Kaistimewaan, BPKA, dan BAZNAS memperkuat tata kelola program yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi Dana Keistimewaan DIY.</li> <li>9. Model Replikasi Program Kampung Berkah dapat menjadi praktik baik (best practice) yang dapat direplikasi di kalurahan lain sebagai model pemberdayaan berbasis nilai spiritual dan ekonomi produktif.</li> </ol>
----	--------------------	--	--	--	---	--

			dengan regulasi Dana Keistimewaan DIY.			<p>10. Penguatan Kolaborasi Multipihak Program ini memperkuat jejaring kemitraan antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, lembaga zakat, dan kelompok masyarakat.</p> <p>Manfaat bagi Kelompok Sasaran (Kalurahan dan Masyarakat) :</p> <p>6. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat memperoleh manfaat ekonomi melalui kegiatan produktif yang terkelola secara berkelanjutan, mulai dari penyediaan benih hingga pemasaran hasil.</p> <p>7. Penguatan Kapasitas dan Kemandirian Pendampingan teknis dari Kelompok Patil Berkah meningkatkan kapasitas masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan usaha, serta manajemen kelompok.</p> <p>8. Penguatan Nilai Spiritual dan Sosial Konsep Kampung Berkah mendorong integrasi nilai keagamaan dalam aktivitas ekonomi dan sosial, sehingga tercipta harmoni serta solidaritas antarwarga.</p> <p>9. Peningkatan Tata Kelola</p>
--	--	--	--	--	--	---

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
						<p>Pemerintahan Kalurahan. Pemerintah Kalurahan memperoleh pengalaman dalam pengelolaan bantuan keuangan yang akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>10. Keberlanjutan Program. Dengan dukungan kelembagaan dan kemitraan strategis, program tidak bersifat jangka pendek, tetapi berorientasi pada keberlanjutan dan pengembangan jangka panjang.</p>

5.	Sekretariat Program MBG	<p><b>Unsur Pembina (Forkopimda dan Instansi Vertikal)</b></p> <p>Terdiri dari Gubernur DIY, Ketua DPRD DIY, unsur Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Polda DIY, TNI (Darat, Laut, Udara), serta BIN DIY.</p> <p><b>Unsur Pimpinan Satgas</b></p> <p>Ketua: Sekretaris Daerah DIY</p> <p>Wakil Ketua: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat DIY</p> <p>Sekretaris: Kepala Biro Kesejahteraan</p>	<p>Unsur Pembina : <b>Peran:</b> Memberikan arahan strategis, dukungan kebijakan, serta pengawasan umum pelaksanaan program.</p> <p>Unsur Pimpinan Satgas :</p> <p><b>Peran:</b> Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan memastikan percepatan pelaksanaan program secara lintas sektor.</p> <p>Unsur Kementrian dan Lembaga Vertikal :</p> <p><b>Peran:</b> Dukungan teknis regulasi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, serta standar pemenuhan gizi.</p> <p>Unsur Perangkat Daerah :</p> <p><b>Peran:</b> Pelaksanaan teknis sesuai bidang urusan masing-masing, penganggaran, pengawasan, penyediaan data, distribusi, serta dukungan sarana prasarana.</p>	<p>Output kegiatan Sekretariat Program MBG adalah terbitnya <b>Surat Keputusan (SK) Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DIY</b> serta pembentukan <b>Kelompok Kerja (Pokja) MBG</b> sebagai perangkat operasional pelaksanaan program.</p> <p>SK Satgas Percepatan menjadi dasar hukum pelaksanaan koordinasi lintas sektor, penetapan susunan keanggotaan, serta pembagian tugas dan tanggung jawab para pihak dalam percepatan implementasi MBG. Sementara itu, Pokja MBG berfungsi sebagai tim teknis yang melaksanakan koordinasi operasional, perencanaan aksi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program secara terstruktur dan berkelanjutan.</p>	<p>Kelompok sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah peserta didik pada satuan pendidikan, termasuk PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA atau sederajat, serta santri pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan. Program ini juga memprioritaskan anak dari keluarga kurang mampu dan wilayah dengan risiko kerawanan pangan atau stunting, dengan</p>	<p><b>Manfaat bagi OPD</b></p> <p>Program MBG memperkuat peran OPD dalam koordinasi lintas sektor bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketahanan pangan. Program ini mendukung pencapaian indikator kinerja daerah terkait penurunan stunting, peningkatan kualitas kesehatan peserta didik, serta penguatan tata kelola kolaboratif antarperangkat daerah. Selain itu, melalui Satgas dan Pokja MBG, terbangun sistem perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program yang lebih terintegrasi dan akuntabel.</p> <p><b>Manfaat bagi Kelompok Sasaran</b></p> <p>Program MBG memberikan manfaat langsung berupa pemenuhan asupan gizi yang lebih baik bagi peserta didik dan santri, sehingga mendukung tumbuh kembang, kesehatan, serta konsentrasi belajar. Bagi keluarga, program ini membantu mengurangi beban pengeluaran konsumsi harian. Secara jangka panjang, MBG berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pencegahan stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
----	-------------------------	---	---	--	---	--

	<p>Rakyat Setda DIY.</p> <p><b>Unsur Kementerian/ Lembaga Vertikal</b></p> <p>Meliputi Kanwil Kementerian Agama, BBPOM, serta unsur pelayanan pemenuhan gizi (KPPG dan SPPG).</p> <p><b>Unsur Perangkat Daerah DIY</b></p> <p>Meliputi Bappeda, BPKA, Inspektorat, serta dinas- dinas terkait (Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Koperasi dan UKM, Perindustrian</p>			<p>satuan pendidikan sebagai lokus pelaksanaan kegiatan pemenuhan gizi.</p>	
--	---	--	--	---	--

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		dan Perdagangan, PUP-ESDM, PMK Dukcapil, Lingkungan Hidup, Kominfo, Tenaga Kerja, Perhubungan, Kesbangpol), serta Biro terkait di Setda DIY.				

# BAB IV Penutup

---

**Bab IV berisi :**

1. Kesimpulan
2. Langkah Perbaikan Kinerja

## 4.1 Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY tahun 2025

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian tujuan “Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat” diukur dengan indikator persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda. Target capaian indikator tujuan tahun 2025 sebesar 60%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 63,64%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 106,07%.
2. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama” diukur dengan indikator persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 80%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 103,85%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 129,81%.
3. Hambatan dalam pencapaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY pada Tahun 2025 antara lain:

- Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang dinamis menuntut adanya penyesuaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat daerah;
  - Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi nonpemerintah dalam menangani isu strategis kesejahteraan rakyat masih perlu ditingkatkan.
4. Adapun faktor kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Tahun 2025 di antaranya adalah:
- Ketepatan dalam mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan kebijakan;
  - Intensitas koordinasi dan sinkronisasi yang kuat antar pemangku kepentingan;
  - Ketersediaan dukungan anggaran yang memadai.

#### **4.2 Langkah Perbaikan Kinerja**

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan adaptasi terhadap dinamika kebijakan Pemerintah Pusat melalui penguatan monitoring, evaluasi, dan penyesuaian program secara berkala.
2. Mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektor dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
3. Memperkuat kualitas perumusan kebijakan dan pemanfaatan anggaran melalui pendekatan berbasis data serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.

# LAMPIRAN



Lampiran 2. Berita Acara Penyelarasan Kinerja



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

*Yogyakarta*

Alamat: Kepatihan Danurejan Yogyakarta 55213, Telepon (0274) 562811, Faksimile (0274) 521818  
Pos-el: morganisasi@jogjaprov.go.id, Laman: bimorganisasi.jogjaprov.go.id

**BERITA ACARA RAPAT PENYELARASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH  
NOMOR 0100 B-63/1635/BR.6**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Ruang Rapat B Bapperida DIY, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : Marga Adityas Rechman Wiguna, S.Psi.  
NIP : 1995033120201121023  
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan  
Alamat : Biro Organisasi Setda DIY, Unit 5, Komplek Kepatihan,  
Danurejan, Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Biro Organisasi Setda DIY, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

II Nama : Doddy Bagus Jatmiko, SE., Akt.  
NIP : 198012022006041009  
Jabatan : Perencana Ahli Muda  
Alamat : Bapperida DIY, Komplek Kepatihan Danurejan, Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama Kepala BAPPERIDA DIY selanjutnya disebut Pihak Kedua.

III Nama : Oktaria Widyastuti, SE  
NIP : 199310072020122020  
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan  
Alamat : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY, Unit 5, Komplek  
Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Bertindak...

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut Pihak Ketiga.

Sesuai dengan hasil pembahasan penyalarsan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga secara bersama-sama telah menyepakati penyalarsan kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program Perangkat Daerah sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara ini,
2. Apabila terhadap substansi pada poin 1 (satu) masih memerlukan tambahan data/penjelasan/keterangan, Pihak Ketiga bersedia melengkapi dan memberikan penjelasan lebih lanjut secara tertulis yang disampaikan selambatnya pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Yogyakarta

Pihak Ketiga,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Oktarifa Widyastuti, SE

Doddy Bagus Jatmiko,  
SE., Akt.

Marga Adityas Rachman  
Wiguna, S.Psi

Mengetahui  
Kepala Biro Organisasi,  
  
Ana Windyawati, S.H., M.H.



**PERJANJIAN KINERJA TUJUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : Biro Kesejahteraan Rakyat  
 Jabatan : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya bahan masukan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda	%	80	Triwulan I	80
					Triwulan II	80
					Triwulan III	80
					Triwulan IV	80*)

Keterangan:

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Pejabat...

**PERJANJIAN KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : Biro Kesejahteraan Rakyat  
 Jabatan : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitas kehidupan beragama	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar yang menjadi masukan bahan kebijakan dan fasilitas keagamaan	%	80%	Triwulan I	80
					Triwulan II	80
					Triwulan III	80
					Triwulan IV	80*)
2.	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori	A (88,19)	Triwulan I	A (88,19)
					Triwulan II	A (88,19)
					Triwulan III	A (88,19)
					Triwulan IV	A (88,19)*)

Keterangan:

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Pejabat...

**PERJANJIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2020**

Perangkat Daerah : Biro Kesejahteraan Rakyat  
 Jabatan : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran Program	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Program)	Sebaran	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Dukungan Terhadap Terejadinya Kesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	Rumusan kebijakan bidang bina mental, kesehatan, dan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjut	Dokumen	5 Dokumen	Triwulan I	5 Dokumen
						Triwulan II	5 Dokumen
						Triwulan III	5 Dokumen
						Triwulan IV	5 Dokumen <sup>*)</sup>
2.	Dukungan Terhadap Terejadinya Kesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjut	Rumusan	4 Rumusan	Triwulan I	4 Rumusan
						Triwulan II	4 Rumusan
						Triwulan III	4 Rumusan
						Triwulan IV	4 Rumusan <sup>*)</sup>
3.	Dukungan Terhadap Penyelenggaraan Kerestimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Program Penyelenggaraan Kerestimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Pengabdian dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan	13 Laporan	Triwulan I	13 Laporan
						Triwulan II	13 Laporan
						Triwulan III	13 Laporan
						Triwulan IV	13 Laporan <sup>*)</sup>

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1.1. Program: Kesejahteraan rakyat (APBD)	Rp4.145.272.750
a. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	Rp3.408.100.000
b. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Rp352.252.900
c. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Rp364.913.850
1.2. Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (APBD)	Rp411.517.550
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp10.666.600
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp13.778.000
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp12.425.000
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp200.553.950
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp8.900.000
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp105.194.000
1.3. Program: Penyelenggaraan Kerestimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Data Kerestimewaan)	Rp4.100.740.000
a. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Rp4.100.740.000
Jumlah Anggaran	Rp8.657.539.300

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

3. Selanjutnya Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat akan menyusun Penjabaran Perjanjian Kinerja yang memuat pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sub-Kegiatan yang mendasarkan pada Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.


Yogyakarta, 30 Januari 2025

Pitak Redat  
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,  
  
Haryono, Buwono X

Certama  
Kepala Kantor Kesparteraan Rakyat,  
  
A. Saiful Mujlis, S.I.P., M.Si

Lampiran 4. Evaluasi AKIP Tahun 2024

2

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**INSPEKTORAT**  
*Inspektorat*

Alamat: Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Kode Pos 55199 Telepon (0274) 562008  
Faksimile (0274) 512567 Pos-el: inspektorat@jogjaprov.go.id Laman: <http://inspektorat.jogjaprov.go.id>

---

20 Maret 2025

Nomor : D-700.1.2.1/462/INS  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY Tahun 2024 (AKIP Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY)

Yth. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2024 (sebagaimana sesuai Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelambagaan Pemerintah Daerah DIY pada Tahun 2025 terdapat perubahan kelembagaan perangkat daerah menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY), sebagai berikut:

**A. PENDAHULUAN**

**1. Dasar Hukum Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelambagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

e. Keputusan *f*

- e. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 529/KEP/2024 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
- f. Surat Tugas Inspektur DIY Nomor 054/III/INSR/2025 tanggal 3 Maret 2025 untuk melaksanakan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY Tahun 2024 (AKIP Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY).

## **2. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui penguatan pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Melalui Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY.

## **3. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## **4. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

## **5. Sasaran**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2024.

6. Metodologi

#### 6. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

#### 7. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, pada Pasal 97 ayat (1) menyebutkan bahwa Biro Bina Mental Spiritual mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang bina mental spiritual.

Adapun fungsi Biro Bina Mental Spiritual mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Biro;
- b. menyiapkan bahan kebijakan bidang kebijakan bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kebudayaan kesehatan masyarakat pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan;
- c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan, bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kebudayaan kesehatan masyarakat pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan;
- d. fasilitasi kehidupan beragama;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijak bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kebudayaan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan;
- f. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Biro;
- g. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Biro;
- h. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro

Dalam \_\_\_\_\_

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY memiliki susunan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan;
- c. Kasubag Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.


**8. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah**

Implementasi AKIP pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala;
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut;
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY telah menggunakan Aplikasi SENGUHU dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi ASN Momayu sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

Inovasi lain dalam peningkatan kinerja yang digunakan oleh Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY yaitu:

- 1) Aplikasi SIMBAH (Sistem Informasi Hibah Rumah Ibadah) yang merupakan sarana untuk mempermudah masyarakat melakukan proses pemberkasan Hibah rumah ibadah;
- 2) Aplikasi Posbindu Satriya yang merupakan aplikasi rekam medik bagi pengguna layanan posbindu satriya yang dikoordinasikan oleh Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY.

9. Tindak 

### **8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah menindaklanjuti dengan menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal antara lain dengan meningkatkan kualitas koordinasi internal dan kolaborasi Perangkat Daerah terkait sehingga pada masa selanjutnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Pemerintah Daerah.

## **B. GAMBARAN HASIL EVALUASI**

### **1. Hasil Evaluasi AKIP**

Hasil evaluasi yang dibuangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY memperoleh nilai sebesar 87,01. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,20 atau 90,67% dari bobot sebesar 30%;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 26,00 atau 86,67% dari bobot sebesar 30%;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,76 atau 85,05% dari bobot sebesar 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 21,05 atau 84,20% dari bobot sebesar 25%.

### **2. Rekomendasi**

Direkomendasikan kepada Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY agar:

- a. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah pada komponen Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga pada masa selanjutnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;

b. Mempertahankan... f

- b. Mempertahankan serta meningkatkan praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dalam rangka menunjang pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah DIY.

### C. PENUTUP

#### 1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY memperoleh nilai 87,01. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

#### 2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjangka, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY (AKIP Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY) Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
Inspektur  
Muhammad Setiadi, S.P.L., M.Acc.

Tembusan:  
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Lampiran 5. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2024



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ꦱꦺꦏꦺꦠꦫꦶꦠꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦴꦩꦠꦤ꧀ꦢꦶ

Kepalihan Danurejan Yogyakarta Kode Pos 55213 Telepon (0274) 562811 Pawai 1189  
 Pos-el [sekretariat@kemendagri.go.id](mailto:sekretariat@kemendagri.go.id) Laman keara jogjapro.go.id

Tanggapan/Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY Tahun 2024

No	Rekomendasi LHE AKIP Surat Inspektur DIY Nomor 12/700.1.2.1/462/INS Tanggal 20 Maret 2025	Tindak Lanjut
1	Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah pada komponen Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga pada masa selanjutnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Pemerintah Daerah	Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap manajemen kinerja yang meliputi Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melibatkan peran lintas sektor secara intensif melalui rapat koordinasi
2	Mempertahankan serta meningkatkan praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dalam rangka menunjang pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah DIY	Biro Kesejahteraan Rakyat terus mengupayakan praktik baik budaya kinerja melalui kegiatan apel rutin setiap Senin pagi dan peningkatan kapasitas pegawai setiap triwulan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan solidaritas antar pegawai dengan harapan meningkatnya semangat kerja yang mendorong pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah DIY

Dibuat di Yogyakarta

tanggal 26 Maret 2025

Revisi Biro Kesejahteraan Rakyat,



Muslim, S.I.P., M.Si.



**PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**